



KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023. Maka dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Laporan Kinerja tahun 2019 adalah merupakan pertanggungjawaban tahun pertama dalam periode RPJMD tersebut.

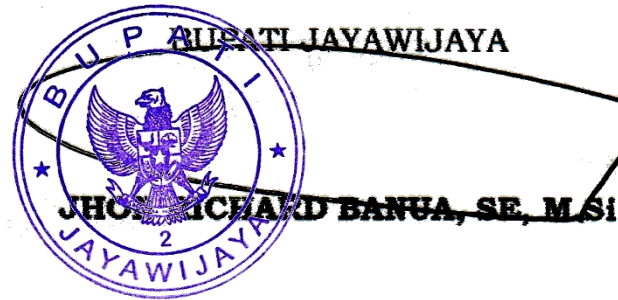
Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD tahun pertama dan RKPD tahun 2019 yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kabupaten Jayawijaya selama Tahun 2019. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Kabupaten Jayawijaya. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Kabupaten Jayawijaya secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jayawijaya agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih.

Wamena, Maret 2020



IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Terkait dengan hal tersebut diperlukan penerapan suatu sistem pelaporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, cepat dan akurat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jayawijaya disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban. Capaian kinerja ini tentunya bukan hanya capaian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya semata tetapi juga menggambarkan capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum.

Secara ringkas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan 3 sasaran yang terdiri dari 7 indikator kinerja memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 107,59 persen dengan predikat Sangat Baik.
2. Hasil evaluasi capaian kinerja misi Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jayawijaya dengan 2 sasaran yang terdiri dari 3 indikator kinerja memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,73 persen dengan predikat Sangat Baik
3. Hasil evaluasi capaian kinerja misi Meningkatkan Perkonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan dengan 3 sasaran yang terdiri dari 5 indikator kinerja memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 119,51 persen dengan predikat Sangat Baik.
4. Hasil evaluasi capaian kinerja misi Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis dan Damai dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar Orang Asli

Papua (OAP) dengan 3 sasaran yang terdiri dari 3 indikator kinerja memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 117,84 persen dengan predikat Sangat Baik.

5. Hasil evaluasi capaian kinerja misi Meningkatkan Infrastruktur Dasar untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Yang Berkelanjutan dan Memadai dengan 2 sasaran yang terdiri dari 2 indikator kinerja memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 67,44 persen dengan predikat sedang.
6. Hasil-hasil evaluasi capaian kinerja di atas menunjukkan hasil yang baik karena dari 5 misi, 4 berpredikat Sangat baik dan 1 berpredikat Sedang. Namun target pencapaian IKU dapat terealisasi 103,42 persen. Hasil ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Ikhtisar Eksekutif	iii	
Daftar Isi	v	
Daftar Tabel	vi	
Daftar Gambar	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Gambaran Umum Kabupaten Jayawijaya	2
1.3	Pertumbuhan Ekonomi	7
1.4	Kondisi Pemerintahan	10
1.5	Jumlah Aparatur Sipil Negara	14
1.6	Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Rencana Strategis 2018-2023	16
2.2	Rencana Kinerja Tahun 2019	24
2.3	Perjanjian Kinerja	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja	29
3.2	Akuntabilitas Kinerja	32
3.3	Realisasi Anggaran	66
BAB IV	PENUTUP	68
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jayawijaya.....	4
Tabel 1.2	Jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan kelompok umum dan jenis kelamin Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019	6
Tabel 1.3	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019	7
Tabel 1.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019	14
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya .	25
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019	27
Tabel 3.1	Pengukuran dengan skala ordinal	30
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2019	31
Tabel 3.3	Capaian Nilai Maturitas SPIP se Provinsi Papua Tahun 2019.	37
Tabel 3.4	Komponen nilai SAKIP	39
Tabel 3.5	Rekapitulasi “nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Nilai-AKIP) Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Periode 2015-2018	40
Tabel 3.6	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019	44
Tabel 3.7	Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Tahun 2014-2018	46
Tabel 3.8	Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua.....	49
Tabel 3.9	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019	53
Tabel 3.10	Produksi perikanan per jenis komoditi Tahun 2019	55
Tabel 3.11	Persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota se-Propinsi Papua (Persen)	56
Tabel 3.12	Fasilitas umum, fasilitas pemerintah, rumah tinggal, bangunan tempat usaha yang terbakar dan rusak akibat bencana social/konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019	59
Tabel 3.13	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Jayawijaya	61
Tabel 3.14	Laporan realisasi anggaran daerah Tahun 2019	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Luas Kabupaten Jayawijaya dibedakan menurut penggunaannya	3
Gambar 1.2	Peta administrasi Kabupaten Jayawijaya	3
Gambar 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014-2018 (Persen)	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Jayawijaya

1.2.1 Kondisi Geografis

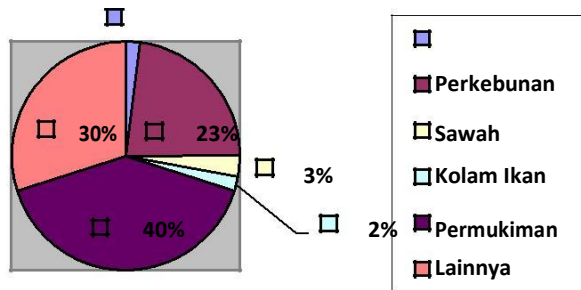
Kabupaten Jayawijaya secara geografis terletak di jantung Pulau Papua dengan sebutan Lembah Agung. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk Pertanian / perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian. Topografi wilayah Kabupaten Jayawijaya pada umumnya merupakan pegunungan dan bagian tengah merupakan lembah. Tingkat kemiringan rata - rata lereng yang bervariasi 8 - 15° seluas 51 persen, 25 - 40° seluas 29 persen, lebih dari 60° seluas 20 persen dan berada pada ketinggian 1.550 dari permukaan laut, dengan rata - rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya, yang cukup memadai untuk ketersediaan budidaya pertanian.

Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten dengan luas wilayah 8.469 km². Wilayah Kabupaten Jayawijaya sebagian besar masih merupakan daerah kawasan hutan, karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan - kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 168.025,9 ha; daerah persawahan sekitar 308 ha atau 3 persen dan perkebunan dengan luas sekitar 1.976 ha atau; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai 40 persen. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Jayawijaya dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain - lainnya.

Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Jayawijaya berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Papua. Disamping potensi dibidang pertanian, Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah produksi tanaman perkebunan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat.

Gambar 1.1
Luas Kabupaten Jayawijaya
Dibedakan Menurut Penggunaannya

2%	Hutan
----	-------

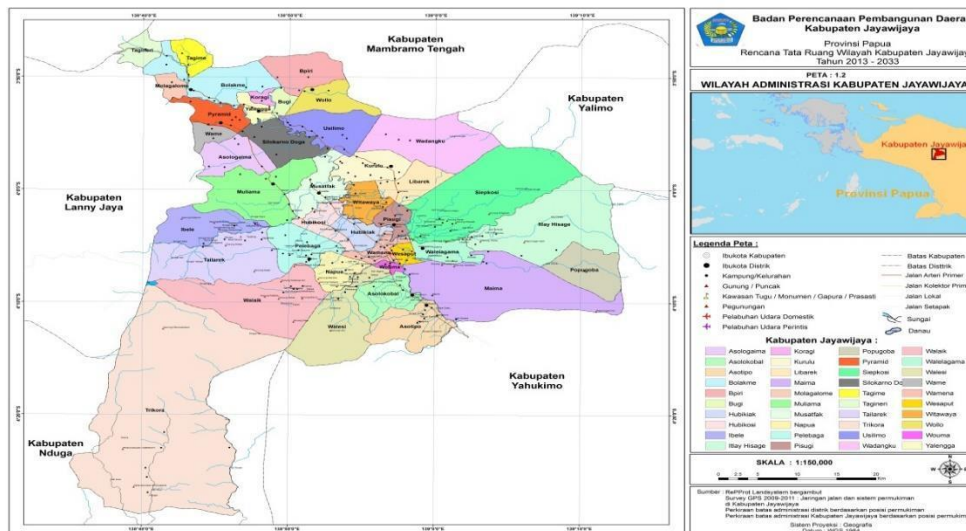


Sumber : Data Olah Bappeda Jayawijaya 2018

Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Jayawijaya terletak antara 138.30° - 139-40° BT dan 3.45° - 4.20° LS dengan ketinggian 1.650 di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan ibukota Wamena memiliki batas –batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Yalimo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Yalimo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Yahukimo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara dan Mamberamo Tengah

Gambar 1.2
Peta Administrasi Kabupaten Jayawijaya



Secara administratif Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 40 (empat puluh) Distrik, 4 (empat) Kelurahan dan 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Kampung. Distrik dengan Kampung terbanyak adalah Pelebaga (13 Kampung), sedangkan Distrik dengan Kampung paling sedikit adalah Wame dan Popugoba (masing-masing 4 Kampung). Distrik dengan wilayah terluas adalah Siepkosi (384, 41 Km),

Distrik dengan luas wilayah terkecil adalah Wouma (48,75 Km). Secara rinci pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah Kabupaten Jayawijaya, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jayawijaya

No	Nama Distrik	Luas Wilayah (Km)	Jumlah	
			Kelurahan	Kampung
1.	Wamena	110,85	3	8
2.	Asologaima	156,97	-	10
3.	Kurulu	187,62	-	12
4.	Musاتفak	189,43	-	10
5.	Asolokobal	187,99	-	9
6.	Walelagama	147,74	-	6
7.	Hubikosi	105,97	-	11
8.	Pelebaga	190,95	-	13
9.	Bolakme	339,87	-	12
10.	Yalengga	105,58	-	11
11.	Wollo	157,6	-	8
12.	Trikora	876,25	-	6
13.	Napua	150,24	-	9
14.	Walaik	258,03	-	5
15.	Wouma	48,75	-	7
16.	Silo karno dogo	191,54	-	8
17.	Pyramid	150	-	10
18.	Muliama	363,27	-	12
19.	Usilimo	203,42	-	10
20.	Wita Waya	149,94	-	5
21.	Libarek	157,27	-	5
22.	Wadangku	300,02	-	5
23.	Pisugi	109,41	-	7
24.	Walesi	366,93	-	7
25.	Asotipo	243,27	-	10
26.	Maima	379,54	-	7
27.	Itlayhisage	322,16	-	9
28.	Siepkosi	384,41	-	9
29.	Hubikiak	158,67	-	8
30.	Ibele	203,71	-	10
31.	Tailarek	306,01	-	8
32.	Tagime	141,95	-	11
33.	Molagalome	104,59	-	6
34.	Tagineri	141,98	-	9
35.	Koragi	50,18	-	5
36.	Bugi	102,22	-	8
37.	Bpiri	194,39	-	7
38.	Wesaput	56,31	1	7
39.	Wame	144,51	-	4
40.	Popugoba	356,31	-	4
		8.495,85	4	328

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033

Melihat Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jayawijaya, terlihat jelas terdapat 40 Distrik dengan total luas wilayah 8.495,85 km² dengan jumlah 4 Kelurahan dan sebanyak 328 Kampung. Melalui data diatas, terlihat bahwa 328 kampung merupakan kebutuhan lokasi program prioritas yang akan menjadi rujukan dalam spasial data.

Beberapa distrik yang memiliki jumlah kampung terbanyak antara lain pada distrik Hubikosi, Yalengga, dan Tagime memiliki jumlah kampung masing-masing 11 Kampung, sedangkan distrik Kurulu, Bolakme, dan Muliama memiliki jumlah kampung masing-masing 12 kampung, sedangkan untuk distrik Pelebaga memiliki jumlah distrik 13 distrik. Distrik Trikora walaupun distrik ini hanya memiliki 6 kampung, namun jika dilihat dari konektivitas akses masih cukup memiliki tantangan, hal ini disebabkan akses transportasi ke distrik trikora dapat diakses melalui transportasi udara (helicopter).

1.2.2 Kondisi Demografi

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah – masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 mencapai 272.490 jiwa. Tingkat Kepadatan Penduduk rata – rata 31,17 Orang / Km² dari luas wilayah sebesar 8.469 km².

Tabel 1.2
Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Struktur Umur	Laki-Laki		Perempuan		L + P	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

0-4	4.731	1,74	4.483	1,65	9.214	3,38
5-9	9.512	3,49	8.526	3,13	18.038	6,62
10-14	13.118	4,81	11.417	4,19	24.535	9,00
15-19	15.218	5,58	13.124	4,82	28.342	10,40
20-24	18.911	6,94	15.838	5,81	34.749	12,75
25-29	14.992	5,50	12.720	4,67	27.712	10,17
30-34	12.730	4,67	11.526	4,23	24.256	8,90
35-39	10.064	3,69	10.926	4,01	20.990	7,70
40-44	9.688	3,56	11,604	4,26	21.292	7,81
45-49	9.140	3,35	10.248	3,76	19.388	7,12
50-54	7.903	2,90	8.442	3,10	16.345	6,00
55-59	7.571	2,78	6.526	2,39	14.097	5,17
60-64	3.715	1,36	2.838	1,04	6.553	2,40
65-69	2.636	0,97	1.767	0,65	4.403	1,62
70-74	844	0,31	546	0,20	1.390	0,51
>75	759	0,28	427	0,16	1.186	0,44
Total	141.532	51,94	130.958	48,06	272.490	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jayawijaya sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun (78,43%). Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 50%) merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), sedangkan sisanya sebanyak 19,01 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 2,56 persen merupakan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas)

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan SLTA/Sederajat yaitu sebesar 35.018 atau 12,85 persen dari jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 sebesar 272.490 jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TOTAL	PERSENTASE (%)
----	--------------------	-------	----------------

1	Tidak / Belum Sekolah	159.929	58,69
2	Belum Tamat SD/Sederajat	28.097	10,31
3	Tamat SD/ Sederajat	19.645	7,21
4	SLTP / Sederajat	18.883	6,93
5	SLTA / Sederajat	35.018	12,85
6	D-I/II	1.298	0,48
7	Akademi/D-III/Sarjana Muda	2.231	0,82
8	D-IV/Strata-I	7.002	2,57
9	Strata-II	306	0,11
10	Strata-III	81	0,03
	Jumlah	272.490	100,00

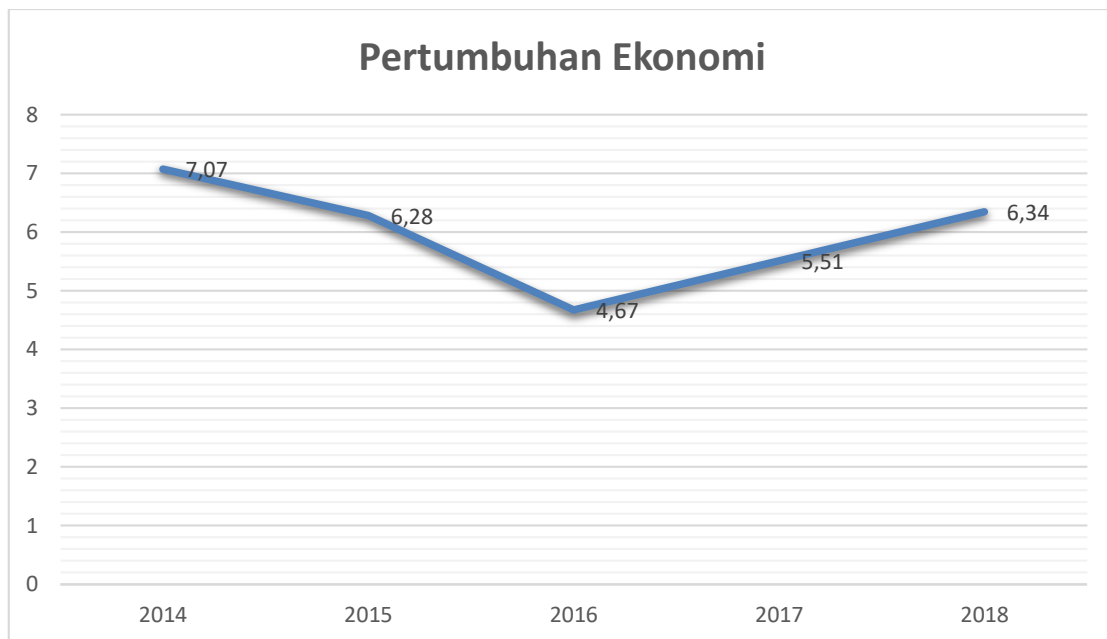
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Jayawijaya pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Jayawijaya atas dasar harga konstan 2010, mencapai 4,52 trilyun rupiah. Angka tersebut naik dari 4,25 trilyun rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,34 persen. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,51 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2018 dipercepat oleh adanya investasi dan telah terjadi pertumbuhan yang pesat hampir dari seluruh sektor. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintah dan fasilitas publik lainnya.

Gambar 1.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2014 – 2018 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, 2019

Seiring dengan aktivitas ekonomi yang kian tumbuh, PDRB per kapita Jayawijaya juga menunjukkan tren peningkatan. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jika pada tahun 2013 PDRB per kapita penduduk Jayawijaya hanya 20,31 juta rupiah, pada tahun 2018 meningkat menjadi 35,38 juta rupiah. Kenaikan ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Jayawijaya.

Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jayawijaya adalah sebesar 89,50 persen. Artinya sebanyak 89,50 persen penduduk Jayawijaya yang berusia 15 tahun ke atas berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian. Sedangkan sisanya 10,50 persen adalah mereka yang termasuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2018 adalah sebesar 0,65 persen. Artinya bahwa hampir seluruh angkatan kerja memiliki status bekerja atau dengan kata lain hampir tidak ada penduduk yang menganggur. Begitu pula yang terjadi pada Kabupaten-Kabupaten pemekarannya. Ketiadaan pengangguran disebabkan karena biasanya dalam satu rumah tangga, pekerjaan bertani/berkebun dilakukan secara bersama-sama antara anggota rumah tangga yang satu dengan yang lain, sehingga meskipun status seseorang hanya sekedar

“membantu”, tetap diklasifikasikan sebagai bekerja. Hal ini menegaskan bahwa *zero unemployment* (TPT=0,00) bukanlah jaminan bagi kesejahteraan penduduknya.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro yang telah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, APBD tahun 2018 disusun sebagai upaya pemerintah melakukan berbagai langkah, antara lain mendorong ekonomi dan meningkatkan gerak dan transaksi ekonomi. Oleh karena itu seluruh proyeksi baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan diharapkan dapat secara efektif menstimulasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya. Untuk mencapai sasaran pembangunan dan kapasitas fiskal yang semakin kuat, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan, menggali mengembangkan sumber – sumber pendapatan asli daerah secara menyeluruh dan profesional.

Belanja daerah tahun anggaran 2019 dilaksanakan dan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak pada kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penggunaannya harus mengedepankan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan prioritas. Dari keseluruhan program pembangunan, sektor ekonomi menjadi fokus utama yang digenjut pertumbuhannya, sebab sektor ini berkaitan langsung dengan upaya mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan ekonomi warga akan menjadi pondasi kuat dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya mengalami fluktuasi karena tidak semua sektor perekonomian daerah bergerak. Bersama –sama, mulai pertanian, perikanan, UMKM, sektor barang dan jasa hingga pariwisata. Selain itu Pemerintah daerah maupun swasta turut serta menggeliatkan perekonomian daerah. Masing – masing memiliki peran penting mendorong semua sektor perekonomian. Tugas Pemerintah daerah menjadi trigger bagi perkembangan daerah dan mengejawantahkan lewat kebijakan sehingga mampu memicu sektor perekonomian warga. Karena itu dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jayawijaya selalu berada pada tren positif walau mengalami fluktuasi.

Dalam meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten juga terus mendorong program afirmasi untuk memastikan seluruh rakyat Jayawijaya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pelosok kampung mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan,

maka diperkirakan stabilitas ekonomi di Kabupaten Jayawijaya dalam tahun 2019 tetap terjaga dan diharapkan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menumbuhkan sektor modern seperti jasa dan manufaktur, namun tetap harus dipastikan pertumbuhan juga terjadi di sektor –sektor menengah ke bawah, sehingga ekonomi kerakyatan dapat terwujud. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah merumuskan enam kebijakan utama yang terdiri atas peningkatan belanja infrastruktur, meningkatkan efisiensi belanja daerah, memantapkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik, pengurangan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah melalui pemerataan pembangunan, mendukung efektifitas dan perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

1.4 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang energi sumber daya mineral;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
15. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Olah Raga dan Pemuda Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
20. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

e. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bencana.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

f. Kecamatan / Distrik, terdiri dari :

1. Distrik Wamena dengan Tipe A;
2. Distrik Asologaima dengan Tipe A;
3. Distrik Kurulu dengan Tipe A;
4. Distrik Hubikosi dengan Tipe A;
5. Distrik Bolakme dengan Tipe A;
6. Distrik Walelagama dengan Tipe A;
7. Distrik Musatfak dengan Tipe A;
8. Distrik Wollo dengan Tipe A;
9. Distrik asolokobal dengan Tipe A;
10. Distrik Pelebaga dengan Tipe A;
11. Distrik Yalengga dengan Tipe A;
12. Distrik Trikora dengan Tipe A;
13. Distrik Napua dengan Tipe A;
14. Distrik Walaik dengan Tipe A;
15. Distrik Wouma dengan Tipe A;
16. Distrik Hubikiak dengan Tipe A;
17. Distrik Ibele dengan Tipe A;
18. Distrik Tailarek dengan Tipe A;
19. Distrik Itlay Hisage dengan Tipe A;
20. Distrik Siepkosi dengan Tipe A;
21. Distrik Usilimo dengan Tipe A;
22. Distrik Wita Waya dengan Tipe A;
23. Distrik Libarek dengan Tipe A;
24. Distrik Wadangku dengan Tipe A;

25. Distrik Pisugi dengan Tipe A;
26. Distrik Koragi dengan Tipe A;
27. Distrik Tagime dengan Tipe A;
28. Distrik Molagalome dengan Tipe A;
29. Distrik Tagineri dengan Tipe A;
30. Distrik Silokarnodoga dengan Tipe A;
31. Distrik Pyramid dengan Tipe A;
32. Distrik Muliama dengan Tipe A;
33. Distrik Bugi dengan Tipe A;
34. Distrik Bpiri dengan Tipe A;
35. Distrik Walesi dengan Tipe A;
36. Distrik Asotipo dengan Tipe A;
37. Distrik Maima dengan Tipe A;
38. Distrik Popugoba dengan Tipe A;
39. Distrik Wame dengan Tipe A;
40. Distrik Wesaput dengan Tipe A;

Selain Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih ditetapkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, sambil menunggu peraturan perundang –undangan yang berlaku / mengatur Urusan Pemerintahan Umum dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Jayawijaya. Begitu juga Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jayawijaya berdasarkan data Simpeg Tahun 2019 sebanyak 3.278 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.059 orang dan perempuan sebanyak 1.219 orang

Tabel 1.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	SD	69	18	87
2.	SMP/SLTP	155	40	195
3.	SMA/SLTA	685	336	1021
4.	DI	2	12	14
5.	DII	46	37	83
6.	DIII	236	286	522
7.	DIV / S1	775	412	1187
8.	S 2	90	78	168
9.	S3	1	0	1
	JUMLAH	2059	1219	3278

Sumber : BKD & PSDM Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2018-2023

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013–2018 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi

mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 - 2023 adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara
Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”**

Penjelasan Visi:

1. Sejahtera, dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia. Dengan melihat definisi sejahtera tersebut maka indikator ketercapaian kesejahteraan pada akhir periode RPJMD Tahun 2023 dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Mandiri secara ekonomi dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan berkembang di atas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing. Dengan melihat definisi mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka indikator ketercapaian kemandirian pada akhir periode RPJMD tahun 2023 dapat diukur melalui rata-rata lama sekolah sebagaimana cerminan ketersediaan sumber daya yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan kemandirian ekonomi, nilai investasi dimana selain berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, juga akan berdampak positif bagi meningkatnya lapangan pekerjaan sehingga selain akan menurunkan angka pengangguran juga akan meningkatkan pendapatan per kapita, persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD sebagai cerminan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.
3. Berkualitas dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (intelligentsia Question), emosional (emotional Question), dan spiritual (spiritual Question) serta sehat jasmani dan rohani dan mampu daya saing.
4. Berbudaya dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma-norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesamanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan

sebagai pencipta. Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Jayawijaya yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide dan kreativitas sehingga pada akhir periode RPJMD masyarakat Jayawijaya mampu menghasilkan karya-karya budaya baik yang berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda, serta memiliki tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat dihormati oleh daerah lain.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dikemukakan diatas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi	Misi
“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya
	Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
	Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
	Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan

Misi- misi pembangunan di atas dijelaskan sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk terus melakukan

reformasi birokrasi melalui empat aspek tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagai upaya peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan sudah dilaksanakan dengan baik pada periode 2013-2018, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil predikat penilaian pengelolaan keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 5 tahun berturut-turut, predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuaskan. Diharapkan pada masa akhir RPJMD tahun 2023 maka kondisi tersebut dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Misi Ke dua : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya; Misi ini dimaksudkan masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan ilmu dan teknologi serta sehat jasmani dan rohani dan mampu berdaya saing. Program pembangunan dalam peningkatan kualitas dan SDM tahun 2013-2018 telah meletakkan pondasi dalam memantapkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia. Hal ini dapat dilihat dari hasil IPM Kabupaten Jayawijaya sebesar 52,94 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 55,99 pada akhir RPJMD TAHUN 2018. Kondisi ini diharapkan akan terus meningkat sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2023.

Misi Ketiga : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan; Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan menumbuh kembangkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi melalui pendekatan kewilayahan dengan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing secara berkelanjutan. Isu pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan produk unggulan lokal, menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dan prioritas, mengingat Kabupaten Jayawijaya memiliki potensi unggulan lokal di bidang pertanian sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan pada akhir periode RPJMD tahun 2023 kondisi masyarakat jayawijaya berada pada kondisi yang mampu berdaya saing dari sisi ekonomi serta mampu berinovasi dalam pengembangan produk local yang menjadi produk unggulan daerah.

Misi Keempat :Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP); Misi ini dimaksudkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membentuk/menciptakan

penduduk yang bermartabat, memiliki norma-norma sosial dan agama yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, guna terbangunnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, serta manusia dan lingkungannya. Dengan mengedepankan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) dalam upaya menjamin keamanan dan ketertiban umum. Pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah dapat dirasakan kondisi aman, tentram dan damai walaupun masih ada peristiwa – peristiwa yang mengganggu rasa aman dan tentram pada masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama, selama ini kita telah meningkatkan rasa saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa di masyarakat, disamping itu dengan keberagaman etnik yang ada di masyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Kabupaten Jayawijaya dengan menanamkan prinsip kasih menembus perbedaan.

Misi Kelima : Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan dan menyediakan infrastruktur daerah termasuk regulasi yang memberikan akses kemudahan bagi pengembangan sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan. Peningkatan sarana dan prasarana publik yang memadai maka dapat mendukung peran Kabupaten Jayawijaya sebagai pusat jasa di Wilayah Pegunungan Tengah Papua.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel yang dijabarkan melalui tujuan :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran :
 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM ASN;

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya kemandirian fiskal

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani. hal ini merupakan turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena di atas adalah: pemerintah berkewajiban untuk membangun sebuah kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah.

Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi mutlak dibutuhkan. Pengejawantahan dari peran tersebut adalah upaya yang sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan adalah mutlak diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintahan yang akuntabel. Hal ini pula yang menjadi kerangka dasar demokratisasi masyarakat, yakni masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah Negara.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia

Jayawijaya yang dijabarkan melalui tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran :
 1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
 2. Meningkatnya budaya baca pada masyarakat;
 3. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
 4. Meningkatnya prestasi olahraga;
 5. Mengoptimalkan Upaya, Derajat, dan Promosi Kesehatan;
 6. Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia terus didorong dengan pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang kepemudaan baik kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber

daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian program pendidikan dan kesehatan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa. Peningkatan kualitas pemuda, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, maupun karakter, menjadi prioritas pemerintah daerah. Pemuda tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari suatu pembangunan, tetapi juga harus terlibat sebagai pengendali dalam proses pengambilan keputusan yang akan berpengaruh bagi pengembangan Kabupaten Jayawijaya yang kelak akan dipimpin para pemuda.

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan yang dijabarkan melalui tujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran :
 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan;
 2. Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif;
 3. Meningkatnya penanaman modal;
 4. Menurunnya persentase KK miskin
 5. Meningkatnya akses kesempatan kerja bagi masyarakat

Pemerintah memiliki tanggung jawab mengusung konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tidak diartikan secara instan memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, melainkan memberikan cara untuk dapat membangun pribadi masyarakat menjadi sebuah profil yang mandiri, memiliki kualitas yang memadai dan mampu bersaing. Kemampuan untuk bersaing adalah mutlak diperlukan karena masing-masing kelompok secara komunal memiliki standar persaingannya sendiri-sendiri. Pada akhirnya pemerintah pun dituntut untuk mampu berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengantarkan masyarakatnya untuk mampu beradaptasi dengan perubahan.

Misi 4 : Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) yang dijabarkan melalui tujuan :

- a. Meningkatkan kelestarian budaya yang ada di masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif
2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya.

Kerukunan menyangkut keseimbangan sosial dalam masyarakat, dimana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Terkadang sulit untuk menciptakan kondisi yang benar-benar tenteram dan damai. Pertikaian yang terjadi dalam masyarakat bisa saja disebabkan oleh banyak faktor kepentingan. Dan kepentingan-kepentingan yang bersinggungan inilah mengakibatkan ketidakharmonisannya hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai manusia modern hendaknya kita bisa menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Kita tidak bisa hidup secara individual. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan. Apalah jadinya bila tidak ada siapapun disaat kita membutuhkan bantuan. Sehebat apapun kita, semua itu ada batasnya. Inilah pentingnya berkomunitas dalam masyarakat. Dengan bersosialisasi dan membaur dalam lingkungan masyarakat diharapkan tercipta sebuah kondisi yang rukun dan damai Ada 4 (empat) hal yang harus dijalankan agar kehidupan manusia itu rukun dan harmonis, melalui 4 (empat) aspek: kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam bermasyarakat dan kerukunan dalam berbudaya.

Dalam perkembangan masyarakat, sebagian sub kebudayaan tersebut telah mengalami akulturasi dan inkulturasi. Oleh karena kebudayaan merupakan kekayaan bangsa, maka harus ada upaya sistimatis dan terencana untuk melakukan perlindungan, pembinaan dan pengembangan terhadap kebudayaan tersebut. Upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan dimaksud menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat, dan orang-perorangan serta penduduk, Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pendirian pusat-pusat kebudayaan, sanggar-sanggar kebudayaan, serta penyebarluasan informasi mengenai kebudayaan melalui media massa dan masyarakat luas. Untuk menjamin terlaksana upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan budaya, maka prinsip yang harus dianut adalah prinsip koordinasi, prinsip partisipasi dan prinsip kerjasama.

Misi 5 : Mengembangkan sektor jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai yang dijabarkan melalui tujuan :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan kawasan untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan, dengan sasaran :
 1. Meningkatkan kualitas aksesibilitas masyarakat;
 2. Meningkatnya infrastruktur energi listrik terhadap RT;
 3. Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur perkampungan ;
 4. Terwujudnya manajemen perhubungan yang berkualitas
 5. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Masyarakat;
 6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim;
 7. Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah.

Sektor jasa dan pariwisata adalah bagian utama yang tidak bisa dilepaskan dari pengembangan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya. Sektor jasa dan pariwisata harus dijadikan sektor andalan dalam perekonomian dan diharapkan pemerintah mendukungnya dengan memberikan kebijakan yang positif. Untuk percepatan pembangunan dengan titik berat di daerah, sepantasnya memberikan daya picu yang kuat dalam membangun sebuah rumusan kebijakan yang tertata, strategis dan berorientasi pada kepentingan warga masyarakat. Kepala Daerah di daerah otonom memiliki keleluasaan dalam mewarnai derap pembangunan di daerahnya dengan tetap dalam kerangka NKRI dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat. Penekanan pada kesejahteraan warga masyarakat tidak hanya berorientasi kepada peningkatan taraf hidup dalam kaca mata finansial, melainkan pula pada taraf kenyamanan dan keterjaminan layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat sebagai subyek pembangunan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2019

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Pertimbangan pokok adalah ketersediaan anggaran, kemampuan dan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah, agar menjamin kepastian pencapaian sasaran dan

target yang ditetapkan. Mengingat pula bahwa Pemerintah Daerah, mempunyai keterbatasan dalam pengalokasian sumber daya, maka ditetapkan indikator pokok/utama, yang berdaya ungkit besar, menggerakkan seluruh komponen lainnya dalam system pembangunan yang integrative dan koordinatif. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM ASN	1.	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi
		2.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	2.	Opini BPK Level Maturitas SPIP Nilai SAKIP Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e government secara terpadu Indeks Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya kemandirian fiskal		Persentase PAD terhadap pendapatan
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	3.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	3.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah
		4.	Mengoptimalkan upaya derajat kesehatan	4.	Angka Harapan Hidup
3.	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	5.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	5.	Indeks Gini
		6.	Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif	6.	Produktivitas bahan pangan utama Kunjungan wisatawan

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
					Produktivitas perikanan
		7.	Menurunnya Persentase Penduduk Miskin	7.	Persentase Penduduk Miskin
4.	Meningkatkan kelestarian budaya yang ada di masyarakat, perlindungan perempuan dan anak	8.	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	8.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan konflik sosial
		9.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik	9.	Rasio KDRT
		10.	Meningkatnya penguatan perlindungan kekayaan budaya	10.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan kawasan untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan	11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	11.	Indeks kualitas lingkungan hidup
		12.	Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah	12.	Persentase Infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	61%
2.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK	WTP
		Level Maturitas SPIP	2,9
		Nilai SAKIP	50 (CC)
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e government secara terpadu	20%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	50
3.	Meningkatnya kemandirian fiskal	Persentase PAD terhadap pendapatan	3%
4.	Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	5,39
		Harapan Lama Sekolah	7.13
5.	Mengoptimalkan upaya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	58,75
6.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	Indeks Gini	0,33
7.	Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif	Produktivitas bahan pangan utama	19,89 Ton/Ha
		Kunjungan wisatawan	53.616 orang
		Produktivitas perikanan	0,92 Ton/Ha
8.	Menurunnya Persentase Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	37,42%
9.	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	Cakupan penegakan peraturan daerah dan konflik sosial	70.20%
10.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik	Rasio KDRT	0,61%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11.	Meningkatnya Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	66,83%
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	49,88
13.	Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah	Persentase infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan	65,50%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Kebijakan pembangunan daerah pada prinsipnya diimplementasikan dalam sejumlah program strategis daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja pada setiap aspek pembangunan, maka dilakukan penilaian terhadap realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam kelompok Indikator Kinerja Utama. Mengingat pula bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan sebuah sistem yang melibatkan seluruh perangkat daerah maka penilaian capaian kinerja kegiatan dan program pembangunan yang dilaksanakan pada setiap OPD dianggap sebagai capaian kinerja program daerah. Sedangkan capaian kinerja kebijakan, dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), diperoleh dengan cara membandingkan target capaian dengan rata-rata realisasi capaian pada setiap program dalam kelompok kebijakan/IKU. Selanjutnya capaian kinerja dilaporkan melalui media penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan Pemerintah Daerah dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala	Kategori				
86 s/d 100	Baik		Sangat baik		Sangat berhasil
70 s/d 85	Sedang	Atau	Baik	atau	Berhasil
55 s/d 69	Kurang		Sedang		Cukup berhasil
Kurang dari 55	Sangat kurang		Kurang baik		Tidak berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2019 terhadap 20 IKU yang telah ditetapkan maka diperoleh hasil sebagaimana tersaji dalam table 3.2 sebagai berikut:

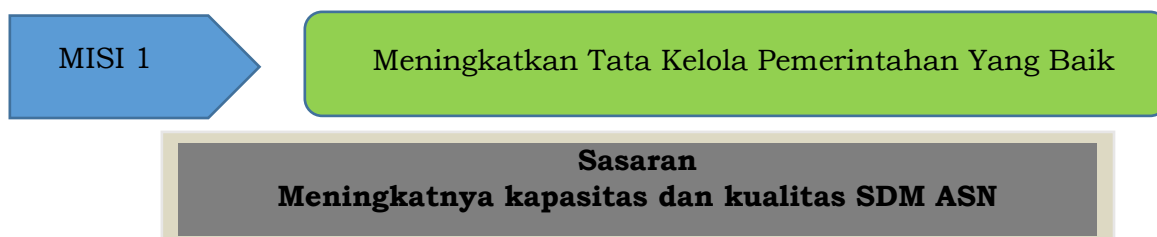
Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET CAPAIAN
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	61%	41,89%	68,67%	Sedang
2.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Sangat Baik
		Level Maturitas SPIP	2,9	2,9623	102,14%	Sangat Baik
		Nilai SAKIP	50 (CC)	42,87 (C)	85,74%	Baik
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e government secara terpadu	20%	38%	190%	Sangat Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat	71	77,91	109,73	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kemandirian fiskal	Persentase PAD terhadap pendapatan	3,2%	3,2%	96,87%	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	5,39 Tahun	4,01 Tahun	74,39%	Baik
		Harapan Lama Sekolah	7.13 Tahun	9,89 Tahun	138,71%	Sangat Baik
5.	Mengoptimalkan upaya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	58,75	59,39	101,09 %	Sangat Baik
6.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	Indeks Gini	0,33	0,25%	124,24%	Sangat Baik
7.	Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif	Produktivitas bahan pangan utama	19,89 Ton/Ha	37,08 Ton/Ha	186,43%	Sangat Baik
		Kunjungan wisatawan	53.616 orang	56.616 orang	105, 59 %	Sangat Baik
		Produktivitas perikanan	0,92 Ton/Ha	0,77 Ton/Ha	83,70%	Baik
8.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduudk Miskin	37,42%	38,33%	97,57%	Sangat Baik
9.	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	Cakupan penegakan peraturan daerah dan konflik social	70.20%	60%	85,47%	Baik
10.	Meningkatnya partisipasi perempuan	Rasio KDRT	0,61%	0,045%	192,62%	Sangat Baik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET CAPAIAN
	dalam pengambilan kebijakan publik					
11.	Meningkatnya Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	66,83%	50,4%	75,43%	Baik
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	49,88%	37,66%	75,50%	Baik
13.	Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah	Persentase infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan	65,50%	38,89%	59,37%	Cukup Baik

3.2 Akuntabilitas Kinerja

Hasil pengukuran seluruh capaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2019 diuraikan dalam analisis capaian kinerja per misi sebagai berikut:



Persentase Penempatan ASN Sesuai Kompetensi

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	61%	41,89%	68,67%	Sedang

Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum sesuai kompetensi. Hal ini dapat dilihat pada target RPJMD persentase penempatan ASN sesuai kompetensi tidak mencapai target pada tahun

anggaran 2019 dimana target yang ditentukan sebesar 61 persen baru dapat direalisasi 41,89 persen dengan capaian kinerja 68,67 persen.

Sebagian besar penempatan pejabat dan staf administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum sesuai kompetensi. Untuk jabatan tertentu seperti guru, tenaga medis, teknik sipil, teknologi informatika, ahli keuangan dan hukum masih kurang. Selain itu, masih terdapat penyimpangan dalam penempatan ASN seperti guru yang ditempatkan sebagai kepala Distrik atau ASN yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesehatan masyarakat ditempatkan sebagai kepala Distrik. Masih terdapat pejabat yang menduduki jabatan belum memenuhi syarat sebagai Kepala Distrik atau Sekretaris Distrik dengan pangkat/golongan II.

Penempatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus sesuai dengan kompetensi pegawai sehingga pegawai dalam bekerja harus lebih profesional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini mengeluarkan peraturan baru dalam mengatur kompetensi pegawai yaitu melalui PERMENPAN Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang profesional baik dalam hal kompetensi, sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai tugas dan peranannya masing-masing. Dalam tahun anggaran 2019 kegiatan diklat secara khusus kegiatan bimbingan teknis tidak dilaksanakan karena tidak dianggarkan hampir disetiap perangkat daerah, kegiatan yang dilaksanakan pada Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya berfokus pada tenaga fungsional teknis. Untuk meningkatkan kinerja pegawai harus ada pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, dapat membantu organisasi untuk memiliki SDM yang kompeten dan handal dalam bekerja.

Untuk mempersiapkan pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural tingkat II dan IV bagi 49 ASN dengan realisasi 100 persen. Sedangkan dalam rangka memenuhi jabatan fungsional sesuai kebutuhan telah ditetapkan target sebanyak 36 ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional yang terealisasi 100 persen. Penempatan CPNS sesuai formasi mencapai 100 persen baik dalam formasi umum yang berjumlah 269 orang maupun formasi khusus yang berjumlah 2 orang. Terdapat 29 ASN yang melaksanakan tugas belajar dan yang terealisasi pembayaran beasiswa

sebanyak 21 orang atau 72,40 persen. Namun pencapaian ini belum bisa mencapai target 61 persen. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pencapaian ini adalah :

- a. Komitmen Bupati Jayawijaya dalam memfasilitasi BKPSDM untuk penetapan pejabat, pegawai tugas belajar maupun penempatan CPNS dengan tepat, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur.
- b. Dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN), KEMENPAN RB dan BKN dalam melakukan supervisi demi mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Sasaran
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Opini BPK

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Opini BPK	WTP	WTP	100	Sangat Baik

Opini BPK merupakan hasil penilaian terhadap tingkat kepatuhan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah, dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan data tabel diatas, capaian tahun 2018 berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 merupakan capaian kinerja tahun 2018 yang memperoleh penilaian pada tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat mempertahankan opini tersebut dari tahun 2015 hingga sekarang.

Opini ini menunjukkan terdapat itikad baik dan kemauan Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pelaporan semua transaksi keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan system akuntansi keuangan daerah, yang berbasis aplikasi Komputer sejak tahun 2006 yang terus dievaluasi setiap tahun dengan menyesuaikan peraturan dan kebutuhan daerah. Aplikasi yang ada saat ini adalah SIMDA Gaji, Aplikasi Pendapatan, Aplikasi Keuangan dan Aplikasi Aset.

Pemerintah Daerah dapat mempertahankan opini tersebut dengan melakukan pencatatan dan pelaporan semua transaksi keuangan yang berbasis akrual dengan menggunakan 7 Laporan Yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca

4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk).

Level Maturitas SPIP

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Level Maturitas SPIP	2,9	2,9623	102,14%	Sangat Baik

Meningkatnya Skor Maturitas SPIP dengan hasil capaian kinerja 102,14 persen, dengan atribut (sangat berhasil) hal ini didasarkan atas penilaian maturitas SPIP tahun 2019 pada Kabupaten Jayawijaya yang merupakan penilaian *reassessment*. Dalam *reassessment* tersebut terdapat kekurangan pemenuhan dokumen pendukung infrastruktur pada 25 (dua puluh lima) Sub Unsur SPIP sehingga belum memenuhi Maturitas SPIP Level 3. Kekurangan pemenuhan dokumen pendukung tersebut, sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pemerintah Pusat belum diturunkan dalam bentuk peraturan pelaksana oleh pemerintah daerah.
- 2) Dari 29 Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, baru 25 Perangkat Daerah yang telah menyerahkan dokumen pemenuhan per sub unsur.
- 3) Masih belum terlihat hubungan keterkaitan antar dokumen pendukung per level dalam setiap sub unsur.

Sedangkan untuk penilaian maturitas SPIP tahun 2018, dengan capaian skor penilaian hasil *reassessment* adalah 3,106 dan skor menurut hasil reviu BPKP Perwakilan Provinsi Papua adalah 3,098 atau terkoreksi 0,008 dengan kategori maturitas “terdefinisi”. Hasil penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP Kabupaten Jayawijaya adalah 78,88 persen atau kurang sesuai dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|--------|
| 1) Persiapan | 87,43% |
| 2) Penilaian pendahuluan tingkat Maturitas SPIP | 100% |
| 3) Pengujian bukti maturitas SPIP | 60,14% |
| 4) Penyusunan laporan | 86,67% |

Penurunan nilai *reassessment* Tahun 2018 ke Tahun 2019 disebabkan :

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

- 1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM dikoreksi dari telah memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan nilai 3 menjadi kriteria “berkembang” dengan nilai 2. Hal ini disebabkan dokumenter terkait kebijakan pembinaan kepegawaian belum terdokumentasi dengan baik.
- 2) Sub unsur pembinaan sumber daya manusia dikoreksi dari telah memenuhi kriteria pada tingkat terdefinisi dengan nilai 3 menjadi kriteria “berkembang” dengan nilai 2. Hal ini disebabkan belum adanya dokumen pendukung evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pembinaan sumber daya manusia.
- 3) Sub unsur pengendalian fisik asset dikoreksi dari telah memenuhi kriteria pada tingkat “terkelola dan terukur” dengan nilai 4 menjadi kriteria ”terdefinisi” dengan nilai 3. Hal ini disebabkan belum adanya dokumen pendukung pelaksanaan evaluasi formal atas SOP/kebijakan pengamanan asset.

Solusi yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Jayawijaya atas penurunan nilai *reassessment* adalah :

- a. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah membentuk satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP pada tingkat kabupaten.
- b. Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Jayawijaya telah mengkoordinasikan penetapan kebijakan dan prosedur terkait pembinaan SDM/kepegawaian sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai dan analisis jabatan untuk semua jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- c. Inspektorat Kabupaten Jayawijaya telah melakukan penilaian mandiri secara berkala untuk mengukur tingkat keandalan (maturitas) penyelenggaraan SPIP dan telah melakukan proses scanning (pemindaian) serta pengarsipan seluruh kertas kerja penilaian SPIP.

Berdasarkan pencapaian realisasi target kinerja pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan dalam target capaian perencanaan jangka menengah Kabupaten Jayawijaya sebesar 74,05 persen. Bila dibandingkan data capaian se provinsi Papua Tahun 2019 Kabupaten Jayawijaya berada pada posisi kedua se Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua, yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3
Capaian Nilai Maturitas SPIP se Provinsi Papua Tahun 2019

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

NO	PEMERINTAH DAERAH	NILAI 2019
1.	Merauke	3,0230
2.	Jayawijaya	2,9623
3.	Provinsi Papua	2,9330
4.	Keerom	2,9230
5.	Kota Jayapura	2,8800
6.	Kepulauan Yapen	2,6190
7.	Asmat	2,5818
8.	Kabupaten Jayapura	2,4000
9.	Nabire	2,1614
10.	Supiori	2,1470
11.	Puncak Jaya	2,1330
12.	Intan Jaya	2,0570
13.	Lanny Jaya	2,0160
14.	Mimika	1,9841
15.	Biak Numfor	1,8680
16.	Paniai	1,7000
17.	Waropen	1,6980
18.	Pegunungan Bintang	1,6820
19.	Sarmi	1,4600
20.	Yahukimo	1,2820
21.	Mappi	1,2740
22.	Boven Digoel	1,2740
23.	Deiyai	1,2084
24.	Nduga	1,1761
25.	Puncak	1,1240
26.	Mamberamo Raya	1,1159
27.	Dogiyai	1,0852
28.	Tolikara	1,0557
29.	Mamberamo Tengah	1,0270
30.	Yalimo	1,0205

Dalam pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya sangat ditunjang oleh sumber daya yang memadai yang meliputi sumber daya aparatur, anggaran

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

dan peralatan dan lain-lain yang dapat menunjang tercapainya kinerja. Sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 berjumlah 23 pegawai dengan berbagai disiplin ilmu dan kompetensi yang tersebar pada jabatan structural sebanyak 4 pegawai, jabatan fungsional auditor sebanyak 10 pegawai dan jabatan fungsional umum sebanyak 19 pegawai. Dengan cakupan bidang pengawasan pada 397 objek pemeriksaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan prioritas penentuan audit berbasis resiko.

Pendanaan kegiatan SPIP Inspektorat Kabupaten Jayawijaya telah didukung oleh anggaran setelah perubahan yang menjadi prioritas dalam tahun 2019 sebesar Rp. 5.449.037,00 atau 0,36 persen dari akumulasi APBD Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp. 1.527.806.795.353,38.

Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai SAKIP	50(CC)	42,87 (C)	85,74	Baik

Penilaian SAKIP bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor surat : B/320/AA.05/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperoleh nilai 42,87 atau predikat "C". penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan mendasar. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Komponen Penilaian SAKIP

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
a.	Perencanaan Kinerja	30	15,83	15,40

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

b.	Pengukuran Kinerja	25	7,66	9,95
c.	Pelaporan Kinerja	15	6,71	5,64
d.	Evaluasi Internal	10	2,74	5,76
e.	Capaian Kinerja	20	8,27	6,12
	Nilai Hasil Evaluasi	100	42,91	42,87
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	C

Berdasarkan tabel di atas, nilai hasil evaluasi ada penurunan 0,04 poin dari tahun 2017 yaitu dari 42,91 turun menjadi 42,87 pada tahun 2018. Komponen penilaian yang turun adalah perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja. Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah kabupaten Jayawijaya telah berupaya menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan untuk memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/*outcome* serta memastikan indikator-indikator kinerja memenuhi kriteria yang terukur, relevan dan cukup seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

Untuk melengkapi dokumen perencanaan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga telah menetapkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yang menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Indikator kinerja, program dan kegiatan perangkat daerah.

Bila dibandingkan data capaian se Provinsi Papua Tahun 2018 Kabupaten Jayawijaya berada pada posisi keenam se Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)
Provinsi/Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Periode 2015-2018

No.	Provinsi/Kabupaten/	Perkembangan Nilai AKIP				Total Nilai AKIP	Predikat			
		2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
1	Pemerintah Provinsi Papua	46.04	51.18	60.04	62.59	219.85	C	CC	B	B
2	Kota Jayapura	35.16	44.7	54.34	57.83	192.03	C	C	CC	CC
3	Kab. Jayapura	37.86	39.02	50.43	58.84	186.15	C	C	CC	CC
4	Kab. Mimika	38.04	40.79	43.83	44.78	167.44	C	C	C	C
5	Kab. Merauke	30.66	37.23	37.53	52.04	157.46	C	C	C	CC
6	Kab. Jayawijaya	25.6	30.74	41.2	42.45	139.99	D	C	C	C
7	Kab. Mappi	30.54	31.11	35.5	36.87	134.02	C	C	C	C
8	Kab. Asmat	36.49	Tdk Eval	42.86	45.73	125.08	C	-	C	C
9	Kab. Nabire	21.78	26.27	32.04	47.14	127.23	D	D	C	C
10	Kab. Keerom	20.08	20.29	34.08	47.32	121.77	D	D	C	C
11	Kab. Yalimo	Tdk Eval	25.08	40.06	41.54	106.68	-	D	C	C
12	Kab. Waropen	Tdk Eval	21.68	40.68	30.73	93.09	-	D	C	C
13	Kab. Kep. Yapen	Tdk Eval	23.67	34.06	30.72	88.45	-	D	C	C
14	Kab. Sarmi	Tdk Eval	Tdk Eval	37.36	34.12	71.48	-	-	C	C
15	Kab. Biak Numfor	Tdk Eval	Tdk Eval	37.27	30.66	67.93	-	-	C	C
16	Kab. Boven Digoel	Tdk Eval	Tdk Eval	33.43	34.89	68.32	-	-	C	C
17	Kab. Mamberamo Raya	Tdk Eval	24.26	Tdk Eval	30.09	54.35	-	D	-	C
18	Kab. Pegunungan Bintang	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	30,80	30,80	-	-	-	C
19	Kab. Lanny Jaya	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	30,10	30,10	-	-	-	C
20	Kab. Paniai	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	30,10	30,10	-	-	-	C
21	Kab. Deyai	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	30,07	30,07	-	-	-	C
22	Kab. Puncak Jaya	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	-	-	-	-	-
23	Kab. Yahukimo	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	-	-	-	-	-
24	Kab. Tolikara	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	-	-	-	-	-
25	Kab. Supiori	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	-	-	-	-	-
26	Kab. Nduga	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	-	-	-	-	-
27	Kab. Mamberamo Tengah	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	-	-	-	-	-
28	Kab. Puncak	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	-	-	-	-	-
29	Kab. Dogiyai	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	-	-	-	-	-
30	Kab. Intan Jaya	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	Tdk Eval	-	-	-	-	-

Sumber : KEMENPAN dan RB RI

Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan e Government Secara Terpadu

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government	20%	38%	190%	Sangat Baik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengisyaratkan bahwa untuk terciptanya efisiensi dan transparansi dalam system penyelenggaraan pemerintahan baik pada Pemerintahan Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota harus dilakukan secara elektronik. Target capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya terkait penerapan *e-government* dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada 29 perangkat daerah telah dilaksanakan melalui ketersediaan jaringan *Fiber Optik (FO)* dan layanan internet untuk penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik.

Pada tahun anggaran 2019 jumlah perangkat daerah yang dapat menerapkan *e-government* secara terpadu adalah 19 perangkat daerah atau 65 persen dari 29 perangkat daerah telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 20 persen dengan realisasi 38 persen dan capaian kinerja 190 persen. Pencapaian kinerja ini karena tersedianya perangkat yang dibelanjakan melalui belanja modal tahun 2019 dan tergabungnya seluruh perangkat daerah di satu lokasi (gedung otonom) memperpendek jarak jangkauan kabel *Fiber Optik* sehingga makin banyak perangkat daerah yang bisa dijangkau dengan koneksi *Fiber Optik*. 19 perangkat daerah yang dapat menerapkan *e-government* adalah :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Pekerjaan Umum
13. Dinas Perikanan
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
18. Dinas Kesehatan (laboratorium Kesehatan)
19. Rumah Sakit Umum Daerah Wamena

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) realisasi sebanyak 8 perangkat daerah (27,59%) juga telah melampaui target 2019 (20%) karena adanya ketersediaan anggaran yang cukup memadai dan dibandingkan dengan tahun 2017 pada posisi 0 persen. Dari 19 perangkat daerah yang telah terhubung dengan kabel *Fiber Optik* dan menerapkan *e-government* dalam melaksanakan tugas terdapat 8

perangkat daerah yang telah memanfaatkan system jaringan *e-government* secara terpadu dengan menggunakan aplikasi yaitu :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Aplikasi Gaji dan SIKEUDA
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Aplikasi *e-Planning*
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Aplikasi SIAK
4. Rumah Sakit Umum daerah Wamena : SIM Rumah Sakit
5. Sekretariat Daerah : Aplikasi LPSe dan TPP
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : Aplikasi Promosi Pariwisata
7. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP : Aplikasi Perizinan
8. Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM : Aplikasi SIMPEG

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dibanding dengan target jangka menengah untuk tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa dari realisasi 65 persen perangkat daerah yang terkoneksi jaringan Fiber Optik, tersisa 35 persen sampai dengan akhir periode RPJMD (10 Perangkat daerah yang belum terkoneksi jaringan *Fiber Optik*) bisa terkoneksi semuanya (100%). Capain ini dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dalam rangka terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Pusat ke daerah perlu perencanaan secara bertahap melalui program perencanaan terpadu disertai dengan anggaran yang memadai. Capaian 65 persen ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah Kabupaten Jayawijaya dapat melaksanakan program penerapan *e-government* secara terpadu untuk mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka terwujudnya program Indonesia satu data dari Pusat sampai ke daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat	71	77,91	109,73	Sangat Baik

Pada dasarnya baik dan tidaknya kinerja suatu pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa jauh kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil kuesioner kepuasan masyarakat yang disebar perangkat daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2019, rata-rata mutu pelayanan adalah 77,91 dengan kategori B atau baik, melebihi target yang ditetapkan sebesar 71 dengan capaian kinerja 109,73 persen. Beberapa nilai unsur menunjukkan bahwa

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

masyarakat sangat puas atas pelayanan yang diberikan antara lain biaya/tarif, kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan dan perilaku pelaksana. Dengan demikian masyarakat Jayawijaya yang menerima layanan dari perangkat daerah merasa puas dari hasil penilaian tersebut.

Hasil mutu pelayanan tersebut sejalan dengan penilaian yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019 terhadap kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan Administrasi di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dari 64 Produk layanan administrasi diperoleh nilai 90,99 dan termasuk dalam zona hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.

Namun dari beberapa unsur penilaian masih ada yang mendapat nilai terendah yaitu sarana dan prasarana serta waktu pelayanan, dapat dilihat kenyataan dilapangan bahwa sarana dan prasarana masih menjadi persoalan utama yang menghambat pelayanan kepada masyarakat dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berusaha untuk membangun atau menambah sarana prasarana yang kurang sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih maksimal lagi.

Dalam menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat tahun 2018 tidak didukung dengan anggaran namun karena adanya dukungan dari pimpinan daerah dan perangkat daerah, kegiatan ini dapat terselenggara, khususnya dalam penyampaian kuesioner dan pemasangan informasi pelayanan public pada setiap perangkat daerah.

Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal

Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase PAD terhadap pendapatan	3,2%	3,1%	96,87%	Sangat Baik

Capaian Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2019, dengan realisasi sebesar 3,1 persen (Rp. 47.390.422.917,74) dan capaian kinerja 96,87 persen dari target yang ditetapkan sebesar 3,2 persen (Rp. 54.072.871.988,00) . Dibandingkan dengan PAD tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 0,1 persen dari realisasi sebesar 3 persen. Gambaran pendapatan asli daerah sebagai berikut :

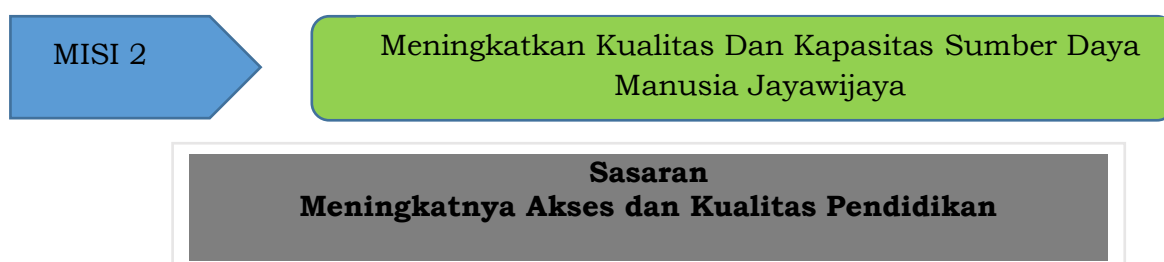
Tabel 3.6

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendapatan	1.506.034.774.140,63	1.471.658.398.371,74	97,71%
2.	Pendapatan Asli Daerah	54.072.871.988,00	47.390.422.917,74	87,64%
	a. Pajak Daerah	13.635.000.000	15.961.109.609	117,05%
	b. Retribusi Daerah	9.709.860.000	8.995.160.330	92,63%
	c. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	2.246.846.281	2.246.846.281	100%
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28.481.165.707	20.187,306.698	70,87%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat secara nominal terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari target yang ditetapkan sebelumnya pada semua sumber PAD, kecuali Retribusi Daerah hanya tercapai Rp. 8.995.160.330,- dari target Rp. 9.709.860.000 dengan capaian 92,63 persen dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah hanya tercapai Rp. 20.187,306.698 dari target Rp. 28.481.165.707 dengan capaian 70,87 persen. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	5,39 Tahun	4,01 Tahun	74,39 %	Baik

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia Jayawijaya. Pada tahun

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

2019 target rata-rata lama sekolah Kabupaten Jayawijaya adalah 5,39 tahun sedangkan realisasinya adalah 4,01 tahun, belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pemerintah daerah. Capaian ini masih berada di bawah pencapaian nasional sebesar 8,34 tahun (Sumber : BPS, Februari 2020).

Angka rata-rata lama sekolah sebesar 4,01 tahun menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 4,01 tahun atau setara kelas 5 SD. Merujuk hal diatas boleh dibilang bahwa umumnya pendidikan dasar 6 tahun di Jayawijaya belum terlaksana secara maksimal. Capaian rata-rata lama sekolah tahun 2019 masih berada di bawah target karena belum optimalnya pendidikan kesetaraan di masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya perlu optimalisasi pendidikan kesetaraan agar dapat secara bertahap mencapai target yang diharapkan.

Harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Harapan Lama Sekolah	7,13 Tahun	9,89 Tahun	138 persen	Sangat Baik

Harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jayawijaya dengan realisasi 9,89 tahun dari target 7,13 tahun yang ditetapkan pada tahun 2019, dengan capaian kinerja 138,71 persen. Walaupun masih berada di bawah capaian nasional sebesar 12,95 tahun (Sumber: BPS, Februari 2020).

Dengan pencapaian harapan lama sekolah 9,89 tahun ini berarti anak-anak di Kabupaten Jayawijaya yang berusia 7 tahun pada tahun 2019, memiliki harapan menikmati pendidikan selama 9 tahun 8 bulan atau minimal mencapai jenjang SMA kelas 1.

Harapan lama sekolah sebesar 9,89 tahun dapat tercapai karena adanya program dan kegiatan antara lain pembangunan/rehab sarana/prasarana sekolah secara baik, dukungan pembiayaan sekolah dari pemerintah terlaksana dengan baik, pengadaan guru kontrak dan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan.

Harapan lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.

Sasaran
Mengoptimalkan Upaya Derajat Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Angka Harapan Hidup	58,75	59,39	101,09	Sangat Baik

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja kesehatan oleh Pemerintah. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk pemberantasan kemiskinan.

Data nasional mencatat bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari 69 tahun pada tahun 2016 menjadi 73,19 tahun pada tahun 2018, sedangkan target yang hendak dicapai pada tahun 2019 adalah 72 tahun. Provinsi Papua dalam 5 tahun pencapaian Angka Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Tahun 2014-2018

KABUPATEN	ANGKA HARAPAN HIDUP MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI PAPAUA TAHUN 2014-2018				
	2014	2015	2016	2017	2018
Merauke	66.49	66.50	66.53	66.56	66.71
Jayawijaya	57.79	58.29	58.48	58.67	58.99
Jayapura	66.02	66.32	66.40	66.47	66.66
Nabire	67.24	67.44	67.50	67.55	67.72
Kepulauan Yapen	68.63	68.67	68.69	68.71	68.85
Biak Numfor	67.85	67.86	67.86	67.87	68
Paniai	65.15	65.45	65.58	65.70	65.94
Puncak Jaya	63.77	64.17	64.29	64.41	64.65
Mimika	71.87	71.89	71.90	71.93	72.06
Boven Digoel	57.64	58.24	58.51	58.77	59.16
Mappi	63.52	64.02	64.16	64.30	64.56
Asmat	55	55.50	55.90	56.32	56.88
Yahukimo	64.56	65.06	65.19	65.32	65.52
Pegunungan Bintang	63.58	63.78	63.84	63.90	64.08
Tolikara	64.66	64.86	64.98	65.10	65.30
Sarmi	65.49	65.69	65.76	65.82	66
Keerom	65.99	66.09	66.13	66.18	66.35

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Waropen	65.72	65.73	65.77	65.82	65.99
Supiori	65.15	65.25	65.29	65.33	65.53
Mamberamo Raya	56.37	56.57	56.74	56.90	57.18
Nduga	53.60	53.60	54.50	54.60	54.82
Lanny Jaya	64.85	64.86	65.63	65.65	65.79
Mamberamo Tengah	62.62	62.72	62.82	62.92	63.14
Yalimo	64.85	64.86	64.90	64.94	65.10
Puncak	64.98	65.08	65.10	65.13	65.33
Dogiyai	64.36	64.86	64.99	65.12	65.32
Intan Jaya	64.88	64.98	65.04	65.09	65.26
Deiyai	64.27	64.47	64.55	64.63	64.83
Kota Jayapura	69.95	69.97	69.99	70	70.15
Provinsi Papua	64.84	65.09	65.12	65.14	65.36

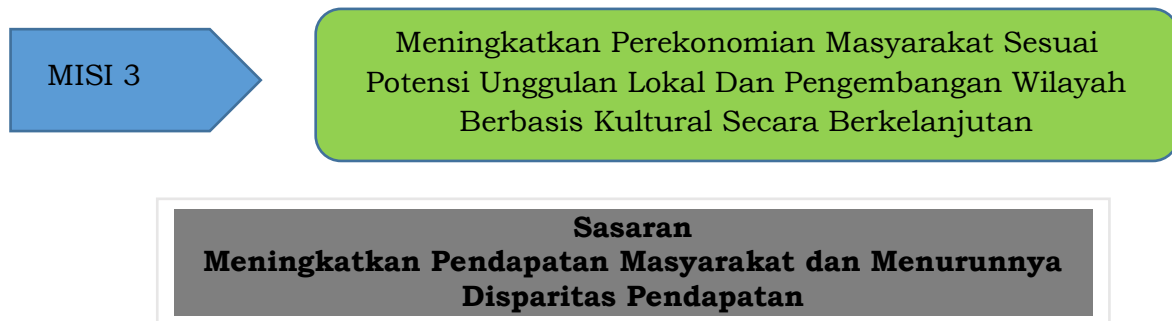
Sumber : BPS Provinsi Papua

Dari tabel diatas menunjukkan Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari tahun 2014 sebesar 64,84 meningkat hingga 65,36 di tahun 2018. Hal ini seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan manusia di Papua terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Propinsi Papua mencapai 60,06. Angka ini meningkat sebesar 0,97 poin atau tumbuh 1,64 persen dibandingkan tahun 2017. IPM Papua berubah status dari Kategori “Rendah” menjadi kategori “Sedang”.

Angka Harapan Hidup pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2019-2024, digunakan sebagai alat ukur pencapaian misi di bidang kesehatan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM guna pencapaian Visi yaitu Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya. Kabupaten Jayawijaya menetapkan target Usia Harapan Hidup untuk tahun 2019 ditetapkan sebesar 58,75 persen.

Pada tahun 2019, data BPS mencatat bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Jayawijaya meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dapat dilihat pada tabel di atas yang menunjukkan, bahwa Kabupaten Jayawijaya menetapkan target Usia Harapan Hidup untuk tahun 2019, sebesar 58,75 persen dengan realisasi 59,39 tahun 2019, terjadi peningkatan yaitu sebesar 0,64 persen dengan capaian kinerja sebesar 101,09 persen. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2018 Angka Harapan Hidup dari 58,99 tahun meningkat menjadi 59,39 tahun pada tahun 2019, ada peningkatan sebesar 1,1 persen selama satu tahun terakhir. Walaupun terjadi peningkatan, namun AHH Kabupaten Jayawijaya masih lebih rendah dibanding AHH Provinsi atau beberapa kabupaten lain yang ada di Papua yang mencapai 65.36 tahun pada tahun 2019.

Salah satu faktor yang mempengaruhi masih rendahnya AHH di Kabupaten Jayawijaya adalah belum meningkatnya kesadaran penduduk terhadap kesehatan yang terlihat dari sedikitnya pemanfaatan tenaga medis dalam persalinan dan melakukan pengobatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, program pembangunan dibidang kesehatan antara lain dengan meningkatkan penyediaan tenaga dan fasilitas kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, meminimalkan angka kematian ibu dan anak, melaksanakan imunisasi, melakukan pemberantasan penyakit menular, menyediakan air bersih, memperbaiki sanitasi, serta meningkatkan pelayanan kesehatan sangat diperlukan agar status pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya dapat terus ditingkatkan.



Indeks Gini

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Gini	0,33	0,25	124,24%	Sangat Baik

Pencapaian indeks gini dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan masyarakat Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data tahun 2019 menunjukkan persentase penurunan disparitas pendapatan cukup signifikan. Capaian penurunan disparitas pendapatan masyarakat dari target 0,33 dengan realisasi 0,25 menunjukkan bahwa rasio kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat semakin berimbang dan cenderung menurun.

Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja dalam rangka penurunan disparitas pendapatan masyarakat di tahun 2019 pada angka 0,25 persen dengan tahun 2018 sebesar 0,30 persen dan 0,33 persen tahun 2017 serta 0,34 persen ditahun 2016 makan tergambarkan dengan sangat jelas bahwa secara bertahap telah terjadi perubahan pola hidup masyarakat dalam upaya peningkatan

pendapatan perkapita melalui aktivitas perekonomian yang dikerjakan setiap hari sehingga secara nyata disparitas pendapatan yang terjadi pun semakin menurun mendekati angka 0 persen pada akhir perencanaan pembangunan jangka menengah 2019-2023 Kabupaten Jayawijaya.

Target penurunan disparitas pendapatan masyarakat pada tingkat nasional maka capaian 0,25 persen pada tahun pertama pelaksanaan dokumen rencana jangka menengah Kabupaten Jayawijaya cukup menjanjikan tercapainya upaya pemerataan pendapatan masyarakat pada Rasio Gini di tahun 2023.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, angka Rasio Gini Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami penurunan, bahkan penurunannya lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Papua. Tahun 2015, angka Gini Rasio Kabupaten Jayawijaya sebesar 0,40 dan berada diperingkat ke 27 dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Setelah itu dari tahun ke tahun angka Rasio Gini Kabupaten Jayawijaya terus mengalami penurunan dengan peringkat yang terus mengalami kenaikan di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, seperti di tahun 2016, angka Rasio Gini di Kabupaten Jayawijaya menurun dari tahun 2015 menjadi sebesar 0,34 dan berada diperingkat 22 Provinsi Papua. Tahun 2017 kembali menurun menjadi 0,30 dan berada diperingkat 11 dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Selanjutnya pencapaian gemilang terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan angka Rasio Gini sebesar 0,25 dan menempatkan Kabupaten Jayawijaya di peringkat 5 Angka Rasio Gini terendah (mendekati 0) di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Perbandingan angka Rasio Gini dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Merauke	0,41	0,34	0,37	0,37	0,35
Jayawijaya	0,4	0,34	0,33	0,3	0,25
Jayapura	0,39	0,31	0,28	0,26	0,4
Nabire	0,39	0,3	0,38	0,33	0,34
Kepulauan Yapen	0,37	0,32	0,33	0,37	0,34
Biak Numfor	0,39	0,36	0,36	0,38	0,34
Paniai	0,32	0,46	0,46	0,33	0,26
Puncak Jaya	0,34	0,15	0,21	0,3	0,38
Mimika	0,33	0,29	0,33	0,29	0,3

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Boven Digoel	0,36	0,33	0,35	0,34	0,3
Mappi	0,34	0,44	0,39	0,32	0,4
Asmat	0,34	0,31	0,23	0,33	0,35
Yahukimo	0,26	0,25	0,33	0,34	0,32
Pegunungan Bintang	0,27	0,29	0,34	0,33	0,33
Tolikara	0,37	0,38	0,3	0,27	0,27
Sarmi	0,35	0,35	0,4	0,38	0,44
Keerom	0,36	0,35	0,36	0,36	0,4
Waropen	0,33	0,31	0,34	0,28	0,3
Supiori	0,28	0,31	0,25	0,32	0,29
Mamberamo Raya	0,23	0,3	0,2	0,4	0,39
Nduga	-	0,25	0,21	0,2	0,18
Lanny Jaya	0,3	0,28	0,31	0,31	0,28
Mamberamo Tengah	0,27	0,27	0,23	0,29	0,28
Yalimo	0,14	0,19	0,25	0,33	0,26
Puncak	0,33	0,19	0,18	0,15	0,17
Dogiyai	0,2	0,25	0,22	0,27	0,3
Intan Jaya	0,27	0,29	0,26	0,25	0,23
Deiyai	0,28	0,25	0,24	0,19	0,2
Kota Jayapura	0,35	0,28	0,32	0,31	0,3
Provinsi Papua	0,42	0,38	0,39	0,37	0,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2019

Keberhasilan peningkatan kinerja dispartitas pendapatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya disebabkan adanya berbagai kebijakan pemerintah terkait upaya peningkatan pendapatan dan penurunan disparitas pendapatan seperti :

1. Adanya keberpihakan pembangunan pada masyarakat Papua melalui Dana Otonomi Khusus (OTSUS) yang sudah bergulir sejak tahun 2001.
2. Adanya bantuan Beras Raskin
3. Alokasi Dana Desa/Kampung yang langsung diterima dan dikelola oleh masyarakat.
4. Angka kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya yang terus menurun dari tahun ke tahun yang tergambarkan pada tahun 2019 dengan capaian 38,33 persen dari

total penduduk Jayawijaya dibandingkan tahun 2018 pada posisi 38,66 persen atau menurun sebesar 0,33 persen.

5. Semakin membaiknya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya yang telah mencapai 5,79 persen di tahun 2019 dibandingkan capaian 56,82 persen ditahun 2018 dan 55,99 persen pada tahun 2017.
6. Semakin membaiknya angka harapan hidup masyarakat Jayawijaya dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2019 telah mencapai 59,39 tahun jauh lebih baik dari tahun 2018 pada angka 58,99 tahun dan 58,67 tahun pada tahun 2017.
7. Indikator lain yang turut berpengaruh terhadap penurunan disparitas pendapatan masyarakat adalah dibidang pendidikan dengan rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 pada angka 5,3 tahun jauh lebih baik dibandingkan tahun 2018 pada posisi 5,17 tahun atau 4,99 tahun pada tahun 2017.
8. Dari sisi pengeluaran perkapita masyarakat Jayawijaya, data statistik menunjukkan bahwa capaian rata-rata pengeluaran perkapita pada tahun 2019 sebesar Rp. 7.835 jauh lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2018 sebesar Rp. 7.637 atau Rp. 7.524 pada tahun 2017.

Pemanfaatan sumber daya dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan disparitas pendapatan dengan indeks gini dimaksudkan sebagai langkah untuk meningkatkan pola hidup masyarakat ke derajat kehidupan yang lebih baik melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan hidup manusia dan alam serta segala sumber daya dan kearifan budaya masyarakat.

Sasaran
Meningkatnya Perekonomian Pada Sektor Ekonomi
Produktif

Produktivitas Bahan Pangan Utama

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Produktivitas bahan pangan utama	19,89 Ton/Ha	37,08 Ton/Ha	186,43 %	Sangat Baik

Realisasi produktivitas bahan pangan utama yang terdiri dari padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, keladi, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau pada tahun 2019 adalah 37,08 Ton/Ha melebihi target yang ditetapkan yaitu 19,89 Ton/Ha dengan capaian kinerja 186,43 persen. Realisasi kinerja tahun 2019, bila dibandingkan dengan target jangka menengah atau pada akhir RPJMD sebesar 46,69 ton/ha,

maka diperlukan upaya berupa program dan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan utama seperti padi, jagung, ubi jalar, keladi, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau.

Peningkatan realisasi kinerja sebesar 37,08 ton/ha, selain didukung melalui program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN, faktor pendukung terbesar adalah upaya penduduk untuk terus memenuhi kebutuhan pangan mereka melalui pembukaan dan penanaman bahan pangan utama. Untuk terus meningkatkan produktivitas bahan pangan utama diperlukan program dan kegiatan strategis yang berkelanjutan dan prioritas serta di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Realisasi kinerja sebesar 37,08 ton/ha dengan capaian kinerja 186,43 persen bukan merupakan jaminan bahwa kebutuhan bahan pangan utama di masyarakat sudah tercukupi, mengingat bahwa produksi yang dihasilkan tidak semua dikonsumsi oleh penduduk Jayawijaya, tetapi dikonsumsi juga oleh penduduk daerah pemekaran yang tinggal di Jayawijaya. Produktivitas bahan pangan utama yang tertinggi adalah ubi jalar 14,58 ton/ha, padi 3,5 ton/ha, ubi kayu 7 ton/ha, keladi 8 ton/ha dan jagung 2 ton/ha. Sedangkan untuk kacang tanah, kedelai dan kacang hijau masih berkisar 1 ton/ha. Dari segi produksi dimana ubi jalar merupakan bahan pangan utama lokal, pada tahun 2019 produksinya sebesar 73.891 ton, keladi 865,6 ton dan ubi kayu sebesar 123,2 ton, sedangkan 5 (lima) komoditi pangan utama lainnya masih di bawah 20 ton. Dengan kondisi yang demikian diperlukan peran pemerintah dalam upaya peningkatan produksi maupun produktivitas bahan pangan utama di Kabupaten Jayawijaya.

Peningkatan realisasi kinerja sebesar 37,08 ton/ha belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya yang memadai dalam hal ini pengalokasian dana. Pada tahun 2019 alokasi pembiayaan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan produktivitas bahan pangan utama yang bersumber dari APBD Kabupaten Jayawijaya belum maksimal karena terkendala dengan adanya pengurangan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Pada aspek program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja, adalah program dan kegiatan yang secara langsung berdampak pada peningkatan produksi dan produktivitas yaitu program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan kegiatan antara lain : optimalisasi lahan tanaman padi sawah, pembukaan lahan tidur dan pengembangan tanaman pangan. Selain program utama diperlukan program pendukung antara lain: program peningkatan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan dan program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan. Pelaksanaan program utama maupun pendukung dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas bahan pangan utama pada tahun 2019 belum maksimal sebagai dampak dari pengurangan alokasi dana otsus bagi Kabupaten Jayawijaya.

Kunjungan Wisatawan

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Kunjungan wisatawan	53.616 orang	56.513 orang	105,59%	Sangat Baik

Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 melebihi yang ditargetkan dari 53.616 orang mencapai 56.513 orang dengan capaian kinerja 105,59 persen. Dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan 7.771 orang yang berkunjung dari 48.742 orang. Jumlah arus kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke daya tarik wisata, wisata minat khusus, event dan lain-lain mencapai angka 6.259 orang. Sedangkan jumlah wisatawan domestik 50.254 orang. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

No	Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik	Tahun 2019		
		WNA	WNI	Jumlah
1.	Data Wisatawan yang menginap di hotel/penginapan pada 20 hotel dan penginapan tradisional	1.224	17.993	19.217
2.	Jumlah kunjungan Wisatawan di 25 Objek wisata	4.435	9.731	14.166
3.	Jumlah kunjungan wisatawan di kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem ke-30	600	22.530	23.130
	Jumlah	6.259	50.254	56.513

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, Tahun 2019

Dari tabel diatas, jumlah kunjungan yang menginap di beberapa hotel yang berada di Kabupaten Jayawijaya yaitu sebanyak 19.217 orang. Jumlah wisatawan domestik atau nusantara dapat dibedakan menjadi wisatawan yang berasal dari luar Provinsi Papua, dari luar Kabupaten Jayawijaya dan masyarakat lokal (Wilayah Pegunungan Tengah) yang menginap.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata selama tahun 2019 yang ada di Kabupaten Jayawijaya, sebanyak 14.166 orang. Jumlah kunjungan masyarakat nusantara khususnya masyarakat lokal masih mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang mengunjungi obyek wisata disaat liburan serta hari-hari keagamaan lainnya.

Jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara terbesar terjadi pada bulan Januari, Februari, Juni, Agustus dan Desember. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus yang bertepatan dengan kegiatan Festival Budaya Lembah Baliem dan Karnaval Budaya, dimana pada tahun 2019 ada pemecahan rekor MURI Noken Raksasa yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jayawijaya.

Selain even tersebut, peningkatan jumlah kunjungan ini didukung oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua yang berfokus di Kabupaten Jayawijaya diantaranya seperti kegiatan pelatihan, pertemuan-pertemuan (kegiatan konvensi), kunjungan kedinasan maupun kunjungan wisata dimana kegiatan dipusatkan di kota Wamena dan setelah melakukan kegiatan tersebut para peserta, pemateri dan para tamu akan melakukan kunjungan ke beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Jayawijaya.

Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya yang dapat mendatangkan jumlah kunjungan wisatawan diantaranya adalah Festival Budaya Lembah Baliem, Festival Band, Karnaval, pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia *Tour and Guide*, SDM Pengelola Daya Tarik Wisata serta kegiatan pemerintahan lainnya yang mendatangkan jumlah orang dan masyarakat yang nantinya akan berdampak pada kunjungan wisatawan ke berbagai obyek wisata. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di beberapa obyek wisata unggulan seperti Obyek Wisata Pasir Putih di Distrik Pisugi, Goa Kuntilola di Distrik Usilimo, dan Kopi Arabika di Distrik Pyramid.

Produktivitas Perikanan

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Produktivitas perikanan (Ton/Ha)	0,92	0,77	83,70	Baik

Salah satu potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat di Kabupaten Jayawijaya adalah perikanan budidaya air tawar (kolam) yang meliputi hampir seluruh wilayah distrik. Hasil produksi perikanan pada tahun 2019 adalah 173,95 Ton dari luas kolam budidaya 225,77 ha. Sehingga hasil produktivitas perikanan tahun 2019 hanya mencapai 0,77 Ton/Ha dari target 0,92 Ton/Ha dengan capaian kinerja 83,70 persen. Dibandingkan dengan hasil produktivitas tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 0,1 Ton/Ha dari 0,67 Ton/Ha menjadi 0,77 Ton/Ha. Belum mencapai target disebabkan antara lain pemanfaatan lahan yang belum optimal untuk pembudidaya ikan dan system pembudidayaan ikan yang masih tradisonal sehingga menyebabkan kurang padatnya penebaran bibit, kurangnya pemberian pakan ikan (hanya mengandalkan alam) dan pengetahuan budidaya yang rendah. Berikut disajikan hasil produksi perikanan tahun 2019 :

Tabel 3.10
Produksi Perikanan per jenis Komoditi Tahun 2019

No	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)
1.	Ikan Mas	69,60
2.	Ikan Nila	57,55
3.	Ikan Mujair	9,05
4.	Ikan Lele	30,65
5.	Udang	7,10

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya, Tahun 2019

Berdasarkan data diatas terlihat komoditas ikan mas menjadi komoditas yang mampu dijadikan unggulan dari segi produksi. Untuk mencapai produktivitas 173,95 Ton/Ha didukung dengan program Pengembangan Bididaya Perikanan dengan anggaran Rp. 5.040.952.000,- dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019.

Sasaran
Menurunnya Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Penduduk Miskin	37,42%	38,33%	97,57%	Sangat Baik

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jayawijaya yang terus menurun dari tahun ke tahun yang tergambarkan pada tahun 2019 dengan capaian 38,33 persen dari total penduduk Jayawijaya dibandingkan tahun 2018 pada posisi 38,66 persen atau menurun sebesar 0,33 persen. Walaupun belum mencapai target 37,42 persen namun realisasi kinerja 97,57 persen menggambarkan keberhasilan dalam menurunkan penduduk miskin. Ini dapat terlihat menurunnya penduduk miskin Kabupaten Jayawijaya dari tahun ke tahun.

Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja dalam rangka penurunan penduduk miskin di tahun 2019 pada angka 38,33 persen dengan tahun 2018 sebesar 38,66 persen dan 38,62 persen tahun 2017 serta 39,66 persen ditahun 2016 maka tergambarkan dengan sangat jelas bahwa secara bertahap telah terjadi perubahan pola hidup masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan perkapita melalui aktivitas perekonomian yang dikerjakan setiap hari sehingga secara nyata penduduk miskin dapat berkurang. Perbandingan persentase penduduk miskin dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua (Persen)

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Merauke	11,1	11,08	10,81	10,54	10,35
Jayawijaya	39,48	39,66	38,62	38,66	38,33
Jayapura	14,69	13,49	13,01	13,44	13,13
Nabire	24,37	26,03	25,38	25,17	24,81
Kepulauan Yapen	27,7	27,54	26,82	27,17	27,13
Biak Numfor	27,23	26,69	25,44	25,72	25,5
Paniai	37,43	39,13	37,4	37,35	37,16
Puncak Jaya	37,45	37,31	36,01	36,27	35,71
Mimika	16,2	14,72	14,89	14,55	14,54
Boven Digoel	19,5	20,82	19,9	20,35	19,66
Mappi	26,96	26,64	25,75	25,64	25,5
Asmat	28,48	27,79	27,16	27,41	26,6
Yahukimo	41,26	40,62	39,33	39,25	38,82

Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
Pegunungan Bintang	31,55	31,52	30,6	30,75	30,51
Tolikara	31,55	31,52	30,6	30,75	30,51
Sarmi	13,85	13,74	13,75	14,51	14,41
Keerom	15,83	17,15	16,69	16,9	16,83
Waropen	31,41	31,25	30,82	30,53	30,95
Supiori	39,25	37,99	37,4	39,22	38,79
Mamberamo Raya	29,71	29,52	29,88	30,1	29,13
Nduga	35,89	38,47	37,29	38,13	28,24
Lanny Jaya	41,97	41,68	39,6	40,06	39,52
Mamberamo Tengah	35,54	38,36	36,38	37,02	36,93
Yalimo	35,88	35,8	34,97	35,45	34,52
Puncak	38,74	38,58	37,46	38,15	38,42
Dogiyai	29,1	31,21	30,36	30,48	31,12
Intan Jaya	41,34	43,73	42,23	42,71	42,92
Deiyai	45,74	45,11	43,63	43,49	43,65
Kota Jayapura	12,22	12,06	11,46	11,37	11,49
Provinsi Papua	28,17	28,54	27,62	27,74	27,53

Sumber, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2019

Menurunnya persentase penduduk miskin juga dipengaruhi oleh meningkatnya garis kemiskinan Kabupaten Jayawijaya yang cenderung naik setiap tahun. Pada tahun 2019 sebesar 420.471 Rupiah/Kapita/Bulan dengan tahun 2018 sebesar 409.846 Rupiah/Kapita/Bulan dan 406.219 Rupiah/Kapita/Bulan pada tahun 2017 serta 367.804 Rupiah/Kapita/Bulan tahun 2016.

Hal ini juga sejalan dengan pencapaian indeks gini dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan masyarakat Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data tahun 2019 menunjukkan persentase penurunan disparitas pendapatan cukup signifikan. Capaian penurunan disparitas pendapatan masyarakat dari target 0,33 dengan realisasi 0,25 menunjukkan bahwa rasio kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat semakin berimbang dan cenderung menurun.

Keberhasilan peningkatan kinerja persentase penduduk miskin di Kabupaten Jayawijaya disebabkan adanya berbagai kebijakan pemerintah terkait upaya menurunkan angka kemiskinan dengan :

1. Adanya keberpihakan pembangunan pada masyarakat Papua melalui Dana Otonomi Khusus (OTSUS) yang sudah bergulir sejak tahun 2001.
2. Adanya bantuan Beras Raskin
3. Alokasi Dana Desa/Kampung yang langsung diterima dan dikelola oleh masyarakat.



Meningkatkan Kondisi Masyarakat Yang Harmonis dan Damai dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua (OAP)

Sasaran
Meningkatnya Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Konflik Sosial

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan konflik sosial	70,20%	60%	85,47%	Baik

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Konflik Sosial, tahun 2019 target sebesar 70,20 persen dengan realisasi tahun 2019 sebesar 60 persen sehingga memiliki nilai capaian tahun 2019 sebesar 85,47 persen dikategorikan sangat berhasil. Bila Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut merupakan wujud komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan patroli pemantauan aktifitas masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang sekiranya melakukan pelanggaran Perda/Perkada dengan melakukan pendekatan budaya dan kebersamaan dalam mengatasi setiap pelanggaran Perda/Perkada untuk mencegah terjadinya konflik Sosial.

Pada tahun 2019 jumlah penanganan pelanggaran perda dan konflik sosial sebanyak 120 penanganan dari 200 kasus pelanggaran Perda dan konflik sosial. Pada tahun 2018 realisasi kinerja mencapai 78 persen sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan realisasi 18 persen yang disebabkan salah satunya pada tanggal 23 September 2019 telah terjadi konflik sosial/kerusakan yang terjadi di kota Wamena yang menimbulkan korban jiwa 31 orang dan material dengan jumlah perkiraan Rp. 479.539.476.000,-, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12
Fasilitas Umum, Fasilitas Pemerintah, Rumah Tinggal, Bangunan Tempat Usaha Yang Tebakar Dan Rusak Akibat Bencana Sosial/Konflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah	Perkiraan Biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Kantor Pemerintah (Otonom dan Vertikal)	16 Kantor	131.574.684.000,-	Terbakar, Rusak Berat, Rusak Ringan Termasuk peralatan kantor dan kendaraan dinas
2.	Sarana prasarana pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi)	18 sekolah	13.994.600.000,-	Terbakar, Rusak Berat, Rusak Ringan
3.	Bangunan rumah tinggal masyarakat	124 unit	110.222.200.000,-	Terbakar total
4.	Bangunan Rumah Toko (RUKO) milik masyarakat	403 unit	180.212.992.000,-	Terbakar Total
5.	Bangunan tempat usaha lainnya (APMS)	1 unit	3.028.000.000,-	Terbakar Total
6.	Kendaraan Masyarakat (Roda 4)	122 unit	38.467.000.000,-	Terbakar Total
7.	Kendaraan Masyarakat (Roda 2)	101 unit	2.040.000.000,-	Terbakar Total
	TOTAL		479.539.476.000,-	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2019

Belum mencapai target selain konflik sosial di atas, disebabkan adanya kebijakan pusat yang tidak dapat di implementasikan karena terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan karakteristik potensi dan permasalahan di daerah dan Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, sehingga belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya serta terbatasnya jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya juga mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya.

Upaya meningkatkan integritas dan kapasitas yang profesionalisme dalam melayani aparatur dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas menuju Kabupaten Jayawijaya Tertib dan menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjalin hubungan sinkronisasi, kerjasama, dan koordinasi yang harmonis dengan penegak hukum serta instansi terkait dan segenap komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan tugas Satpol PP maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian target, realisasi kinerja pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya perlu disusun regulasi yang mengatur dan mengkomodir

hak, kewajiban dan wewenang Satpol PP, mulai dari pola rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier, kesejahteraan serta mengoptimalkan SDM yang ada dan pendekatan agar tetap semangat melaksanakan Tugas.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kinerja tersebut adalah Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang memiliki besaran Anggaran sebesar Rp. 199.540.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Namun dibalik keberhasilan tersebut, terdapat beberapa hambatan/kendala yakni : Luasnya cakupan penegakan perda/perkada yang meliputi luas wilayah, jumlah Perda/Perkada, kurangnya tenaga PPNS untuk penegakan Perda/Perkada, Kurangnya Pengetahuan Anggota tentang Penegakan Perda/Perkada, kurangnya dukungan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan penegakan Perda/Perkada, Kurangnya Sarana kerja terkait pelaksanaan kegiatan Perda/Perkada seperti kendaraan Patroli pemantau dan penegakan Perda/Perkada, dokumen Perda/Perkada, kurangnya sosialisasi dan publikasi perkait Perda/Perkada yang ada.

Sasaran
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan

Rasio KDRT

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Rasio KDRT	0,61%	0,045%	192,62%	Sangat Baik

Target rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 adalah 0,61 persen dan realisasi kinerja adalah 0,045 persen dengan capaian kinerja 192,62 persen. Jumlah kasus KDRT yang terlayani Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2019 adalah 26 kasus KDRT yang melapor, dengan jumlah Kepala Keluarga 57.989 KK.

Masih minimnya laporan dari masyarakat disebabkan banyaknya korban perempuan dalam rumah tangga belum terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga tidak mempunyai akta nikah. Nikah yang dilaksanakan hanya nikah adat dan nikah agama sehingga tidak bisa dikategorikan dalam kasus KDRT tetapi masuk

dalam tindak pidana umum seperti kasus penganiayaan dan lain-lain. Masih adanya stigma dalam masyarakat bahwa masalah KDRT merupakan masalah pribadi dan aib keluarga sehingga tidak perlu dilaporkan.

Sasaran
Meningkatnya Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Budaya Yang dilestarikan

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	66,83%	50,41%	75,43%	Baik

Capaian kinerja Benda, situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan mencapai 75,43 persen dengan kriteria berhasil dari target 66,83 persen dengan realisasi 50,41 persen. Belum tercapai target disebabkan baru tercapai pelestarian 17 cagar budaya dari 18 cagar budaya yang wajib dilestarikan, 2 tugu Cagar Budaya yang dilestarikan dari 10 situs cagar budaya dan 7 kawasan cagar budaya dari 19 kawasan cagar budaya. Dari 7 kawasan cagar budaya baru 3 kawasan cagar budaya yang tertata 100 persen. Objek benda, situs dan cagar budaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Jayawijaya

Jenis	Nama Objek	Tempat/Lokasi	Sudah Dilestarikan	Belum Dilestarikan
Benda Cagar Budaya	1. Mumi Werafak Elosak	Kampung Aikima Distrik Pisugi	V	
	2. Mumi Wim Montok Mabel	Kampung Yiwika Distrik Kurulu	V	
	3. Muni Alongka Huby	Kampung Araboda Distrik Asologaima	V	
	4. Mumi Agatmamente Mabel	Kampung Pumo Distrik Silokanrodoga	V	
	5. Mumi			V
	6. Noken	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	7. Busur/Panah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	8. Tombak	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	9. Holim/Koteka	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	10.Yokal	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	11.Sali	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	12.Mikhak	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	

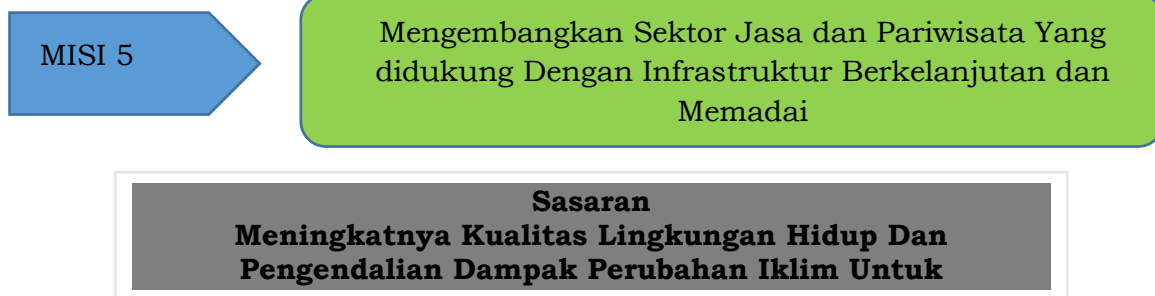
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Jenis	Nama Objek	Tempat/Lokasi	Sudah Dilestarikan	Belum Dilestarikan
	13.Walimo	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	14.Payung Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	15.Kare-kare	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	16.Kakin	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	17.Inumisi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	18.Sulaga	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
	Sub Total		17	1
Situs Cagar Budaya	1. Air Garam Yiwika	Kampung Yiwika Dsotrik Kurulu		V
	2. Air Garam Hitigama	Kampung Kuantapo Distrik Asotipo		V
	3. Goa Lokale	Kampung Wosi Distrik Wosi	V	
	4. Goa Sikepalki	Kampung Wosi Distrik Wosi		V
	5. Goa Togece	Kampung Parema Distrik Wesaput		V
	6. Goa Kontilola	Kampung Isaima Distrik Wosi	V	
	7. Goa Bunda Maria Yiwika	Kampung Yiwika Distrik Kurulu		V
	8. Goa Bunda Maria Pikhe	Kampung Pikhe Distrik Pisugi		V
	9. Sungai Panjat Bukit	Kampung Itlay Hisage Distrik Itlay Hisage		V
	10.Batu Cari Jodoh	Kampung Owasiem Distrik Welesi		V
	Sub Total		2	8
Kawasan Cagar Budaya	1. Tugu pepera	Kelurahan Wamena Distrik Wamena	V	
	2. Tugu Injil Masuk Hitigima	Kampung Hitigima Distrik Asotipo	V	
	3. Patung Yesus Gereja Khatolik	Kelurahan Wamena Distrik Wamena		V
	4. Patung Kur	Kelurahan Wamena Distrik Wamena	V	
	5. Patung Ukumhearik Asso	Kampung Hitigima Distrik Asotipo	V	
	6. Patung Silo Karno Doga	Kampung Silokarno Doga Distrik Silokarno Doga	V	
	7. Museum Pilamo Wesaput	Kampung Wesaput Distrik Wesaput		V
	8. Museum Gereja Khatolik	Kampung Wesaput Distrik Wesaput		V
	9. Telaga Biru	Kampung Maima Dstrik Maima		V
	10.Telaga Anegera	Kampung Anegera Distrik Musatfak		V
	11.Danau Habema	Distrik Trikora		V
	12.Air Terjun Tinggima	Kampung Wolo Distrik Wolo		V
	13.Air terjun Napua	Kampung Napua Distrik Napua	V	
	14.Pasir Putih Aikima	Kampung Aikima Distrik Pisugi	V	
	15.Jembatan Gantung Tradisional Jagoma	Kampung Asotipo Distrik Asotipo		V
	16.Jembatan Gantung Tradisional Sapalek	Kampung Sinakma Distrik Wamena		V

Jenis	Nama Objek	Tempat/Lokasi	Sudah Dilestarikan	Belum Dilestarikan
	17. Jembatan Tradisional Suroba	Kampung Suroba Distrik Suroba		V
	18. Kampung Adat Tradisional Sinapuk	Kampung Kama Distrik Wesaput		V
	19. Kampung Tradisional di 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya	40 Distrik Kabupaten Jayawijaya		V
	Sub Total		7	12
	Total		26	21

Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jayawijaya, 2019

Dari 47 objek cagar budaya baru 26 objek atau 55,32 persen cagar budaya yang sudah dilestarikan, sedangkan 21 objek atau 44,68 persen cagar budaya yang belum dilestarikan. Kendala-kendala yang dihadapi selain kurangnya pembiayaan adalah pengadaan benda cagar budaya mengalami kesulitan karena benda semakin langka harga pun mahal dan berhubungan dengan alat ritual masyarakat adat. Dalam hal penataan lokasi cagar budaya dan kawasan cagar budaya mengalami kendala karena pemilik situs dan kawasan cagar budaya adalah masyarakat hingga banyak persyaratan, salah satunya ritual adat yang membutuhkan biaya.



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,88%	37,66%	75,50%	Baik

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Jayawijaya dari target 49,88 persen dapat direalisasikan sebesar 37,66 persen dengan capaian kinerja 75,50 persen dapat dikategorikan berhasil. Realisasi 37,66 persen didapat dari indeks kualitas air 14,544 persen, indeks kualitas udara 23,118 persen dan indeks tutupan hutan yang belum ada data. Untuk mendapatkan data indeks tutupan hutan harus melalui citra satelit dari LAPAN.

Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja dalam rangka menaikkan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Jayawijaya ditahun 2019 pada angka 37,66

persen dengan tahun sebelumnya (2018) sebesar 37,57 persen dan 37,43 persen (2017) serta 37,32 persen ditahun 2016 maka tergambar sangat jelas terjadi perubahan indeks kualitas lingkungan hidup yang lebih baik walaupun data tutupan hutan belum ada.

Belum tercapai target disebabkan antara lain luasnya cakupan pelayanan persampahan yang meliputi luas wilayah, jumlah arus urbanisasi penduduk dari luar kabupaten maupun daerah lain. Meningkatnya mobilisasi barang dan manusia dengan lancarnya arus barang baik melalui darat maupun lewat udara sehingga dapat mempengaruhi kualitas udara, air dan sampah berbahan plastik. Selain itu meningkatnya kebutuhan bahan baku seperti material pembangunan sangat mempengaruhi akibat galian C tidak terkontrol dan penebangan hutan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kinerja tersebut adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Meningkatkan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan yang memiliki besaran anggaran Rp. 4.222.078.900,-.

Sasaran
Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Jasa dan
Kepariwisata Sesuai Dengan Potensi Daerah

Persentase Infrastruktur Pendukung Jasa dan Kepariwisata

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Kriteria
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan	65,50%	38,89%	59,37%	cukup Baik

Obyek wisata memerlukan dukungan infrastruktur kepariwisataan mencakup moda transportasi umum, jalan dan lahan parker, bangunan irigasi, drainase, fasilitas air bersih dan air kotor, drainase dan pengendalian banjir, penanganan limbah padat, fasilitas telekomunikasi, fasilitas olahraga dan rekreasi. Infrastruktur kepariwisataan yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kemajuan pariwisata di Kabupaten Jayawijaya difokuskan pada 3 hal utama, yaitu pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pariwisata, pembangunan lahan parkir dan kebutuhan akan air bersih.

Secara umum, infrastruktur yang direncanakan tersebut akan menjadi fasilitas fisik yang mendukung kehidupan, keberlangsungan dan pertumbuhan

ekonomi dan sosial masyarakat yang mengacu pada ketersediaannya sarana dan prasarana penunjang jumlah arus kunjungan wisatawan ke lokasi obyek wisata.

Realisasi infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan tahun 2019 baru tercapai 38,89 persen dari target 65,50 persen dengan realisasi kinerja 59,37 persen. Dari 18 infrastruktur pendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) tahun 2019 yang baru terealisasi pada 7 ODTW. 7 ODTW terdiri dari 2 pembangunan jalan dan jembatan, 2 tempat parkir dan 3 fasilitas air bersih.

Fasilitas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pariwisata, dari 13 lokasi yang dibutuhkan, pada tahun 2019 diusulkan 5 lokasi obyek wisata untuk dibangun jalan pariwisata dengan realisasi 2 lokasi obyek wisata telah dibangun jalan non status yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya yaitu pembangunan jalan ke obyek wisata Kampung Wisata Obia sejauh ± 1,5 km dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yaitu pembangunan jalan ke obyek wisata Mumi Araboda sejauh ± 2 km.

Pembangunan infrastruktur tempat parkir, dari 5 lokasi obyek dan daya Tarik wisata yang diusulkan pada tahun 2019, baru terealisasi 2 lokasi obyek wisata yaitu obyek wisata Pasir Putih di Distrik Pisugi dan Obyek wisata Goa Kuntilola di Distrik Usilimo. Total jumlah infrastruktur tempat parkir kendaraan yang telah dibangun di beberapa obyek wisata sebanyak 5 lokasi dari 17 lokasi yang ditargetkan hingga tahun 2023.

Sedangkan untuk infrastruktur air bersih, beberapa ODTW telah mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur air bersih dari beberapa dukungan masyarakat seperti proyek air bersih bantuan Bank BRI, DAK Fisik Kepariwisataan, Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan instansi lainnya. Jumlah obyek wisata yang telah dibangun dengan sarana penunjang seperti toilet/kamar mandi hingga tahun 2019 sebanyak 8 ODTW, sementara sarana infrastruktur air bersih yang menopang sarana tersebut baru ada di 3 ODTW yaitu Goa Lokale, Mumi Kurulu dan Taman Kasuari Sogokmo.

Pada tahun 2019, realisasi infrastruktur pendukung kepariwisataan baru mencapai 10 obyek wisata dari 46 yang direncanakan atau baru 21,74 persen dari target RPJMD pada akhir periode.

3.3 Realisasi Anggaran

Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 1.506.034.774.140,63,- dan terealisasi Rp. 1.471.658.398.371,74,- atau 97,72 persen Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 setelah Perubahan sebesar

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Rp. 1.132.892.260.011.38- dapat direalisasi Rp. 1.004.623.368.954,00,- atau 88,68 persen. Rincian pendapatan dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Laporan Realisasi Anggaran Kas Daerah
Tahun Anggaran 2019

Kode	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.075.000.000	13.635.000.000	15.961.109.609	(2.326.109.609,00)	117,06
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.238.000.000	9.709.860.000	8.995.160.330	714.699.670,00	92,64
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.229.677.627	2.246.846.281	2.246.846.281	-	100
4.1.4	Lian-lain PAD yang Sah	17.159.081.744	28.481.165.707	20.187.306.698	8.293.859.009,26	70,88
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45.701.759.371,00	54.072.871.988,00	47.390.422.917,74	6.682.449.070,26	87,64
4.2	PENDAPATAN TRANSFER					
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana perimbangan					
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	12.670.048.000	12.670.048.000	12.569.892.396	100.155.604,00	99,21
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	25.186.363.000	25.186.363.000	37.360.919.524	(12.174.556.524,00)	148,34
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU)	748.744.131.000	748.744.131.000	748.744.131.000	-	100
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK)	267.897.139.000	272.469.609.000	260.684.435.950	11.785.173.050,00	95,67
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.054.497.681.000,00	1.059.070.151.000,00	1.059.359.378.870,00	(289.227.870,00)	100,03
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	117.040.104.000	51.356.987.512	51.356.987.511	0,63	100
4.2.2.04	Dana Desa	280.676.060.000	280.676.060.000	280.676.060.000	-	100
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	397.716.164.000,00	332.033.047.511,63	332.033.047.511,00	0,63	100
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya					
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.786.674.645	23.415.295.691	22.858.324.073	556.971.618,00	97,62
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	18.786.674.645,00	23.415.295.691,00	22.858.324.073,00	556.971.618,00	97,62
4.2.4	Bantuan Keuangan					
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	43.437.679.000	10.017.225.000	10.017.225.000	-	100
	Jumlah Bantuan Keuangan	43.437.679.000,00	10.017.225.000,00	10.017.225.000,00	-	100
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.514.438.198.645,00	1.424.535.719.202,63	1.424.267.975.454,00	267.743.748,63	99,98
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
4.3.1	Pendapatan Hibah	27.426.182.950	27.426.182.950	-	27.426.182.950,00	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27.426.182.950,00	27.426.182.950,00	-	27.426.182.950,00	0
	Jumlah Pendapatan	1.587.566.140.966,00	1.506.034.774.140,63	1.471.658.398.371,74	34.376.375.768,89	97,72
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.1	Belanja Pegawai	462.067.887.554	433.731.664.534	399.073.788.424	34.657.876.109,75	92,01
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	357.162.332.726	361.467.972.007	335.445.291.827	26.022.680.179,75	92,80
5.1.4	Belanja Subsidi	12.500.000.000	5.349.708.000	5.007.744.000	341.964.000,00	93,61
5.1.5	Belanja Hibah	51.786.988.250	48.036.988.250	35.902.600.000	12.134.388.250,00	74,74
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.810.026.000	7.650.000.000	6.980.000.000	670.000.000,00	91,24
	Jumlah Belanja Operasi	900.327.234.530,12	856.236.332.790,50	782.409.424.251,00	73.826.908.539,50	91,38
5.2	Belanja Modal					
5.2.1	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.127.449.520,00	47.905.187.520,00	37.957.657.958,00	9.947.529.562,00	79,23
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.175.187.205,00	137.901.070.180,00	108.000.757.745,00	29.900.312.435,00	78,32
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.931.245.368,88	67.807.930.520,88	66.583.887.000,00	1.224.043.520,88	98,19
5.2.5	Belanja Modal Tetap Aset Lainnya	2.241.739.000,00	1.191.739.000	1.191.642.000,00	97.000,00	99,99
	Jumlah Belanja Modal	249.825.621.098,88	255.155.927.220,88	214.083.944.703,00	41.071.982.517,88	83,90
5.3	BELANJA TAK TERDUGA					
5.3.1	Belanja Tak Terduga	6.000.000.000,00	21.500.000.000,00	8.130.000.000,00	13.370.000.000,00	37,81
	Jumlah Belanja Tak Terduga	6.000.000.000,00	21.500.000.000,00	8.130.000.000,00	13.370.000.000,00	37,81
	Jumlah Belanja	1.156.152.855.624,00	1.132.892.260.011,38	1.004.623.368.954,00	128.268.891.057,38	88,68
6	TRANSFER					
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	2.950.163.200,00	2.950.163.200,00	2.950.163.200,00	-	100
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.950.163.200,00	2.950.163.200,00	2.950.163.200,00	-	100
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Desa	426.591.552.200,00	390.798.562.200,00	390.798.562.200,00	-	100
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.165.809.942,00	1.165.809.942,00	1.165.789.942,00	20.000,00	99,99
6.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Kartu Papua Sehat	705.760.000,00	-	-	-	0

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Kode	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	428.463.122.142,00	391.964.372.142,00	391.964.352.142,00	20.000,00	99,99
	Jumlah Transfer	431.413.285.342,00	394.914.535.342,00	394.914.535.342,00	20.000,00	99,99
	Jumlah Belanja dan Transfer	1.587.566.140.966,00	1.527.806.795.353,38	1.399.537.884.296,00	128.268.911.057,38	91,60
	Surplus/(Defisit)	-	(21.772.021.212,75)	72.120.514.075,74	(93.892.535.288,49)	-
7	PEMBIAYAAN					3331,25
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
7.1.1	Penggunaan SiLPA	-	21.772.021.212,75	19.262.786.942,93	2.509.234.269,82	88,47
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	21.772.021.212,75	19.262.786.942,93	2.509.234.269,82	88,47
7	PEMBIAYAAN					
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
7.1.2	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	0
	Pembiayaan Netto	-	21.772.021.212,75	19.262.786.942,93	2.509.234.269,82	100
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	91.383.301.018,67	(91.383.301.018,67)	100

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 disusun sesuai dengan penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Laporan ini merupakan upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atas penggunaan berbagai sumber daya khususnya keuangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga seluruh penggunaan sumber daya dipertanggungjawabkan bukan sekadar dengan pembelanjaan yang sesuai dengan rencana belanja, melainkan secara signifikan dan efektif memberikan kontribusi terhadap perwujudan tujuan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Beberapa kesimpulan terkait dengan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019, yaitu antara lain :

1. Pengukuran kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis dari prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menunjukkan capaian indikator kinerja utama tahun 2019 sebesar 103,42 persen, walaupun ada beberapa indikator yaitu yaitu persentase penempatan ASN sesuai kompetensi dan persentase infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan.
2. LKJIP disusun dengan pendekatan kuantitatif atas capaian indikator kinerja masing- masing sasaran strategis dari prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut, bisa jadi belum mampu memberikan informasi yang utuh terhadap berbagai aspek capaian kinerja pembangunan.
3. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap kebijakan dan pelaksanaan program selama tahun 2019, khususnya indikator yang pencapaiannya kurang baik.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses penyusunan LKJIP Kabupaten Jayawijaya menyebabkan belum tersusunnya dokumen LKJIP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 secara maksimal sesuai dengan tata cara dan mekanisme penyusunan LKJIP antara lain adalah :

1. Penyesuaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana RPJMD yang telah ditetapkan, secara keseluruhan belum dapat dipahami dan terakselerasi

dengan perencanaan OPD. Kondisi ini menyebabkan pada beberapa indikator kinerja sasaran yang dipaparkan belum memiliki data dan informasi pendukung yang mencukupi.

2. Masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tepat, sesuai dan relevan dengan sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan, hal ini menyebabkan penjelasan atas analisis kinerja belum dapat dideskripsikan secara akurat.

Berkenaan dengan kendala-kendala tersebut di atas, saran, usulan, langkah tindak lanjut yang dapat disampaikan dan dilaksanakan yaitu :

1. Perlu dilaksanakannya pembinaan penyusunan Indikator Kinerja Utama pada setiap OPD, dalam proses perbaikan dan perubahan RENSTRA OPD yang mengacu pada RPJMD periode baru tahun 2018-2023 yang merupakan landasan perencanaan program dan kegiatan OPD.
2. Perlu dilaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan secara intensif dan menyeluruh pada segenap aparatur pemerintah, agar setiap individu memahami target kinerja yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
3. Perlu peningkatan kualitas pengendalian, koordinasi, dan sistem informasi kinerja sehingga dapat memantau dan mengintegrasikan informasi kinerja secara menyeluruh dalam satu bentuk kegiatan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum mampu secara sempurna menyajikan data dan informasi dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Namun demikian dengan segala keterbatasan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja ini, kami berharap bahwa LKJIP tahun 2019 ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019, dan khususnya dapat menjadi bahan evaluasi pada proses perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di masa yang akan datang.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**



PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

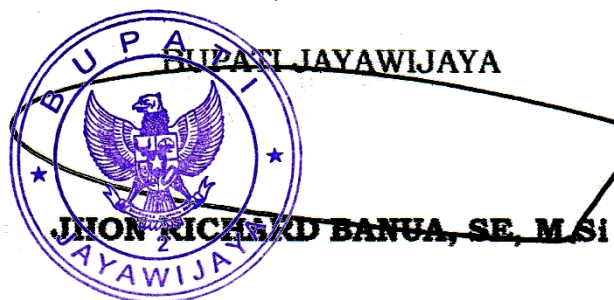
Nama : **JHON RICHARD BANUA, SE, M, Si**

Jabatan : **BUPATI JAYAWIJAYA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wamena, Januari 2019



PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	61%
2.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK	WTP
		Level Maturitas SPIP	2,9
		Nilai SAKIP	50 (CC)
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e government secara terpadu	20%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	71
3.	Meningkatnya kemandirian fiskal	Persentase PAD terhadap pendapatan	3,2%
4.	Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	5,39
		Harapan Lama Sekolah	7.13
5.	Mengoptimalkan upaya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	58,75
6.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	Indeks Gini	0,33
7.	Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif	Produktivitas bahan pangan utama	19,89 Ton/Ha
		Kunjungan wisatawan	53.616 orang
		Produktivitas perikanan	0,92 Ton/Ha
8.	Menurunnya Persentase Penduduk Miskin	Persentase Penduduk miskin	37,42%
9.	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	Cakupan penegakan peraturan daerah dan konflik sosial	70.20%
10.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik	Rasio KDRT	0,61%
11.	Meningkatnya Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	66,83%
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	49,88
13.	Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah	Persentase infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan	65,50%

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	95.200.028.055
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	37.973.853.700
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	3.640.661.850
4.	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Rp.	5.681.336.404
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	3.205.857.000
6.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp.	3.656.995.000
7.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp.	41.382.929.700
8.	Program Pendidikan Non Formal	Rp.	1.500.000.000
9.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	1.800.000.000
10.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp.	6.423.553.069
11.	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Rp.	8.432.087.250
12.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	60.225.000
13.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	257.087.000
14.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp.	1.260.000.000
15.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	1.320.000.000
16.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rp.	20.617.642.000
17.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp.	1.678.000.000
18.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.	1.093.633.000
19.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Rp.	68.006.889.858
20.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	45.599.245.744
21.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp.	36.900.302.000
22.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp.	3.000.360.000
23.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp.	11.954.876.000
24.	Program Penembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp.	10.638.144.000
25.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rp.	2.023.314.848
26.	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	9.470.060.000
27.	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Rp.	349.850.000
28.	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp.	434.600.000

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

29.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.	914.090.000
30.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lai	Rp.	1.166.744.000
31.	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp.	2.500.000.000
32.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp.	100.000.000
33.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp.	99.650.000
34.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp.	699.931.000
35.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp.	249.993.000
36.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Rp.	199.540.000
37.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp.	210.000.000
38.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pehubungan	Rp.	3.000.000.000
39.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp.	50.000.000
40.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp.	827.917.000
41.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarna Perhubungan	Rp.	7.803.480.000
42.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp.	100.000.000
43.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp.	100.360.000
44.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	2.988.448.000
45.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Rp.	330.000.000
46.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	175.000.000
47.	Program Keluarga Berencana	Rp.	11.415.654.000
48.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp.	100.000.000
49.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp.	200.000.000
50.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat	Rp.	50.000.000
51.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Rp.	100.000.000
52.	Program Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp.	320.000.000
53.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	750.000.000
54.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Rp.	150.000.000

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

55.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	2.200.000.000
56.	Program Kemampuan Teknologi Industri	Rp.	200.000.000
57.	Program Penataan Struktur Industri	Rp.	100.000.000
58.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp.	330.000.000
59.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	11.441.176.000
60.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp.	199.100.000
61.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp.	28.333.334
62.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp.	296.500.000
63.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp.	206.653.000
64.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp.	84.906.000
65.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp.	300.000.000
66.	Program Pengelolaan kekayaan Budaya	Rp.	913.975.000
67.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp.	10.547.676.000
68.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp.	199.218.000
69.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp.	8.088.509.000
70.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Rp.	150.000.000
71.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp.	29.333.970.000
72.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp.	1.250.817.900
73.	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Rp.	200.000.000
74.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp.	1.007.873.500
75.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp.	200.365.000
76.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rp.	150.065.000
77.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	3.287.296.000
	x		
78.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp.	150.000.000
79.	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Rp.	645.049.000
80.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp.	900.000.000

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

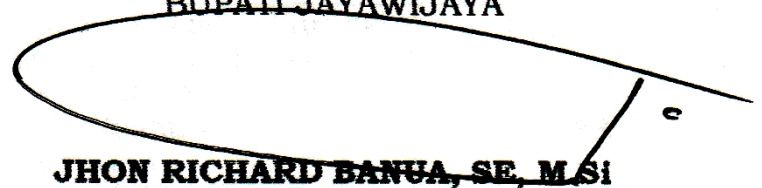
81.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Rp.	250.000.000
82.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp.	394.895.000
83.	Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian /Perkebunan	Rp.	2.636.960.000
84.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp.	1.129.251.000
85.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp.	888.186.325
86.	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Rp.	885.030.000
87.	Program Pembedayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan	Rp.	206.394.000
88.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp.	100.452.000
89.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp.	1.639.995.675
90.	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan	Rp.	82.200.000
91.	Program pengembangan budidaya perikanan	Rp.	5.940.952.000
92.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Rp.	300.000.000
93.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp.	600.000.000
94.	Program perencanaan sosial budaya	Rp.	800.000.000
95.	Program perencanaan prasarana wilayah dan Sumber daya alam	Rp.	600.000.000
96.	Program Penelitian dan pengembangan IPTEK	Rp.	550.000.000
97.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp.	200.000.000
98.	Program pendidikan politik masyarakat	Rp.	100.000.000
99.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.	100.000.000
100.	Program ideology pengembangan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Rp.	144.963.000
101.	Program peningkatkan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Rp.	48.147.213.000
102.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp.	2.757.877.600
103.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	149.959.000
104.	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Rp.	296.409.000
105.	Program penataan peraturan perundang-undangan	Rp.	2.355.007.000
106.	Program penataan otonomi baru	Rp.	399.995.600
107.	Program Kerjasama informasi dan media massa	Rp.	2.399.984.000
108.	Program kerjasama pembangunan	Rp.	2.434.158.100
109.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Rp.	3.000.000.000

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

110.	Program pengembangan data/informasi	Rp.	1.003.445.600
111.	Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.	499.995.100
112.	Program peningkatan sistem informasi dan teknologi manajemen pengadaan barang / jasa	Rp.	241.450.000
113.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp.	36.076.901.600
114.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	12.240.018.000
115.	Program pembinaan dana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rp.	4.182.382.000
116.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp.	659.000.000
117.	Program pendidikan kedinasan	Rp.	200.000.000
118.	Program pembinaan dan pengembangan apartur	Rp.	2.407.000.000
119.	Program peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian	Rp.	80.800.000
120.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp.	153.082.800
121.	Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah	Rp.	5.676.756.148
122.	Program pembangunan sarana dan prasarna kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Rp.	1.600.000.000
123.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp.	3.508.302.700
124.	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp.	4.307.847.850
	Jumlah	Rp.	682.900.685.310

Wamena, Januari 2019

BUPATI JAYAWIJAYA



JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**



PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

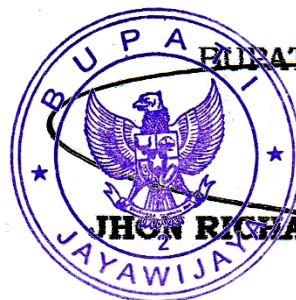
Nama : **JHON RICHARD BANUA, SE, M, Si**

Jabatan : **BUPATI JAYAWIJAYA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wamena, Januari 2020



BUPATI JAYAWIJAYA

JHON RICHARD BANUA, SE, M, Si

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	64%
2.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK	WTP
		Level Maturitas SPIP	3
		Nilai SAKIP	60 (CC)
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e government secara terpadu	40%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77
3.	Meningkatnya kemandirian fiskal	Persentase PAD terhadap pendapatan	4,5%
4.	Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	5,79
		Harapan Lama Sekolah	8.03
5.	Mengoptimalkan upaya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	58,83
6.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	Indeks Gini	0,32
7.	Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif	Produktivitas bahan pangan utama	26,64 Ton/ha
		Kunjungan wisatawan	58.490 orang
		Produktivitas perikanan	1,17 Ton/ha
8.	Menurunnya Persentase Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	36.22%
9.	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	Cakupan penegakan peraturan daerah dan konflik sosial	71,45%
10.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik	Rasio KDRT	0,53%
11.	Meningkatnya Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	68,23%
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	49,97
13.	Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah	Persentase infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan	67,80%

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	71.472.084.155,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	145.106.415.300,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	7.704.044.500,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Rp.	4.499.000.000,00
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	1.375.310.000,00
6.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp.	2.147.500.000,00
7.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp.	33.589.054.700,00
8.	Program Pendidikan Non Formal	Rp.	800.000.000,00
9.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	1.240.000.000,00
10.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp.	6.189.231.669,00
11.	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Rp.	10.080.958.455,00
12.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	39.974.635.744,00
13.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	1.685.769.000,00
14.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp.	1.060.000.000,00
15.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp.	275.000.000,00
16.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	1.758.662.000,00
17.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rp.	8.305.583.014,00
18.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp.	2.367.894.000,00
19.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.	694.536.000,00
20.	Program Peningkatan Sistem Manajemen/Mutu Pelayanan Kesehatan	Rp.	150.000.000,00
21.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Rp.	11.796.000.000,00
22.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Rp.	19.696.922.181,91
23.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp.	57.449.850.000,00
24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp.	4.076.649.000,00
25.	Program Penembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp.	27.021.407.000,00
26.	Program Pengendalian Banjir	Rp.	550.000.000,00

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

27.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp.	4.000.000.000,00
28.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp.	1.727.500.000,00
29.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp.	200.000.000,00
30.	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	22.389.434.000,00
31.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp.	75.000.000,00
32.	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp.	50.000.000,00
33.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp.	811.080.000,00
34.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lai	Rp.	300.000.000,00
35.	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp.	150.000.000,00
36.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp.	100.000.000,00
37.	Program Pembinaan esk Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp.	100.000.000,00
38.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp.	600.000.000,00
39.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp.	50.000.000,00
40.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp.	249.993.000,00
41.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp.	210.000.000,00
42.	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Rp.	50.000.000,00
43.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pehubungan	Rp.	3.000.000.000,00
44.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp.	250.000.000,00
45.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp.	800.000.000,00
46.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarna Perhubungan	Rp.	4.807.670.000,00
47.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp.	200.000.000,00
48.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	2.470.706.000,00
49.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	150.000.000,00
50.	Program Keluarga Berencana	Rp.	8.504.004.000,00
51.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	100.000.000,00
52.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	1.217.796.000,00

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

53.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp.	250.000.000,00
54.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp.	475.000.000,00
55.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	1.450.000.000,00
56.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp.	300.000.000,00
57.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp.	75.000.000,00
58.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp.	200.000.000,00
59.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp.	75.000.000,00
60.	Program Pelayanan Perijinan	Rp.	150.000.000,00
61.	Program Pengelolaan kekayaan Budaya	Rp.	150.000.000,00
62.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp.	7.150.000.000,00
63.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp.	696.804.000,00
64.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rp.	150.000.000,00
65.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp.	5.963.409.584,49
66.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp.	871.000.000,00
67.	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Rp.	100.000.000,00
68.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	Rp.	75.000.000,00
69.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp.	75.000.000,00
70.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp.	568.518.996,00
71.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp.	180.000.000,00
72.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Rp.	150.000.000,00
73.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung	Rp.	999.997.000,00
74.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	107.946.000,00
75.	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Rp.	400.000.000,00
76.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp.	50.000.000,00
77.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan	Rp.	485.000.000,00

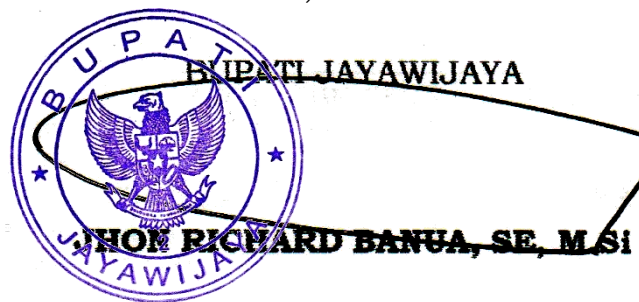
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

78.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Rp.	50.000.000,00
79.	Program peningkatan kesejahteraan petani	Rp.	150.000.000,00
80.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp.	2.000.000.000,00
81.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp.	900.000.000,00
82.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp.	4.480.000.000,00
83.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp.	1.600.000.000,00
84.	Program pengembangan budidaya perikanan	Rp.	3.487.722.000,00
85.	Program pengembangan perikanan tangkap	Rp.	257.400.000,00
86.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp.	300.000.000,00
87.	Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp.	650.000.000,00
88.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp.	350.000.000,00
89.	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Rp.	300.000.000,00
90.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp.	275.000.000,00
91.	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Rp.	54.869.477.800,00
92.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp.	100.000.000,00
93.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	1.729.997.800,00
94.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp.	200.000.000,00
95.	Program kerjasama informasi dan media massa	Rp.	1.850.000.000,00
96.	Program Kerjasama Pembangunan	Rp.	3.150.000.000,00
97.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	3.000.000.000,00
98.	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp.	300.000.000,00
99.	Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.	500.000.000,00
100.	Program Peningkatan Sistem Informasi dan Teknologi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	Rp.	300.000.000,00
101.	Program Peningkatan Integritas dan Keterpaduan Pelaksanaan Penyediaan Barang dan Jasa	Rp.	2.200.000.000,00
102.	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp.	36.103.158.400,00
103.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	11.232.750.000,00
104.	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp.	5.306.900.000,00
105.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp.	629.800.000,00
106.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp.	3.207.000.000,00

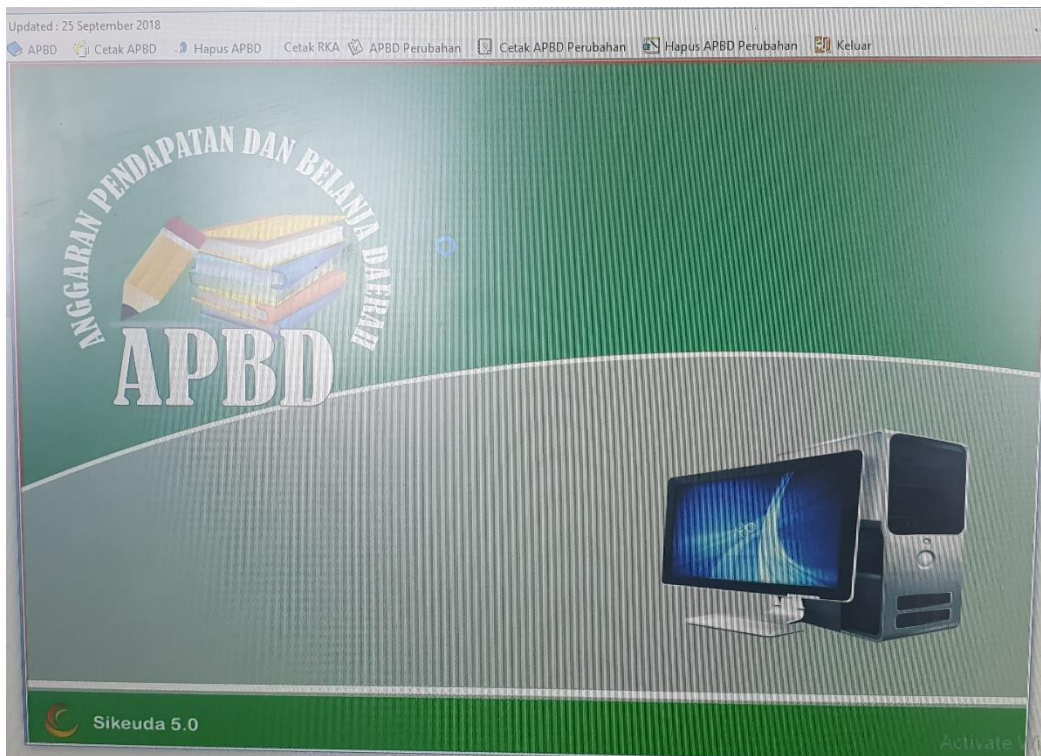
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

107.	Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Kepegawaian	Rp.	80.800.000,00
108.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp.	155.000.000,00
109.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp.	9.421.605.900,00
110.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kampung	Rp.	380.000.000,00
111.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp.	4.401.796.000,00
112.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp.	2.103.757.700,00
113.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2.364.040.750,23
	Jumlah	Rp.	693.163.571.649,63

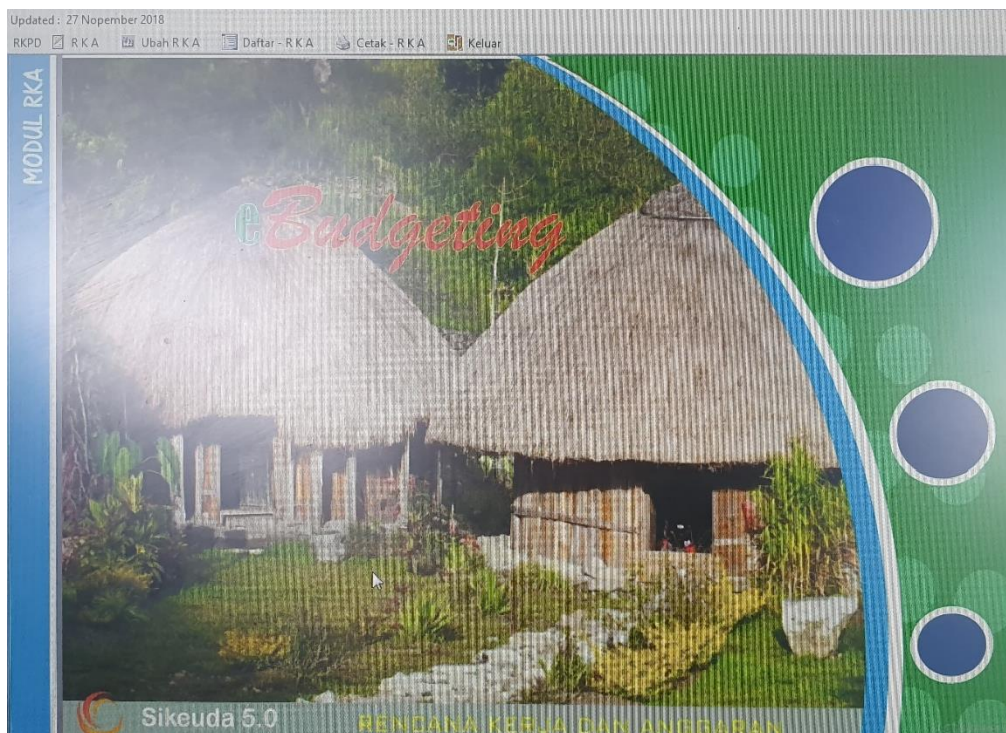
Wamena, Januari 2020



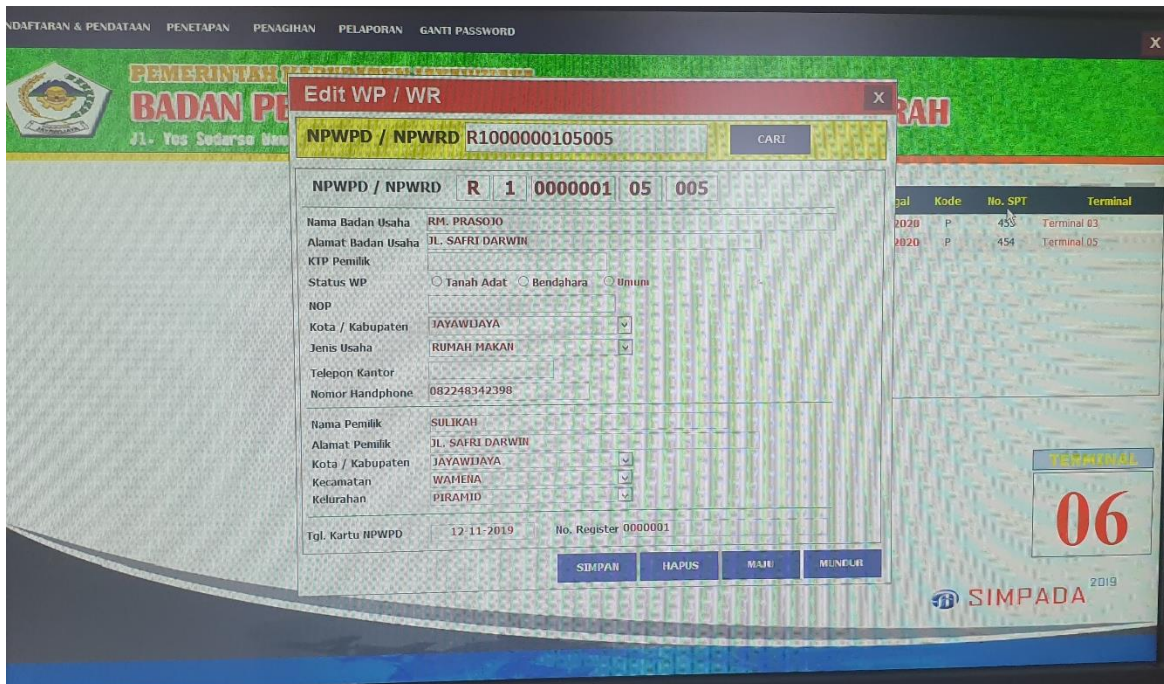
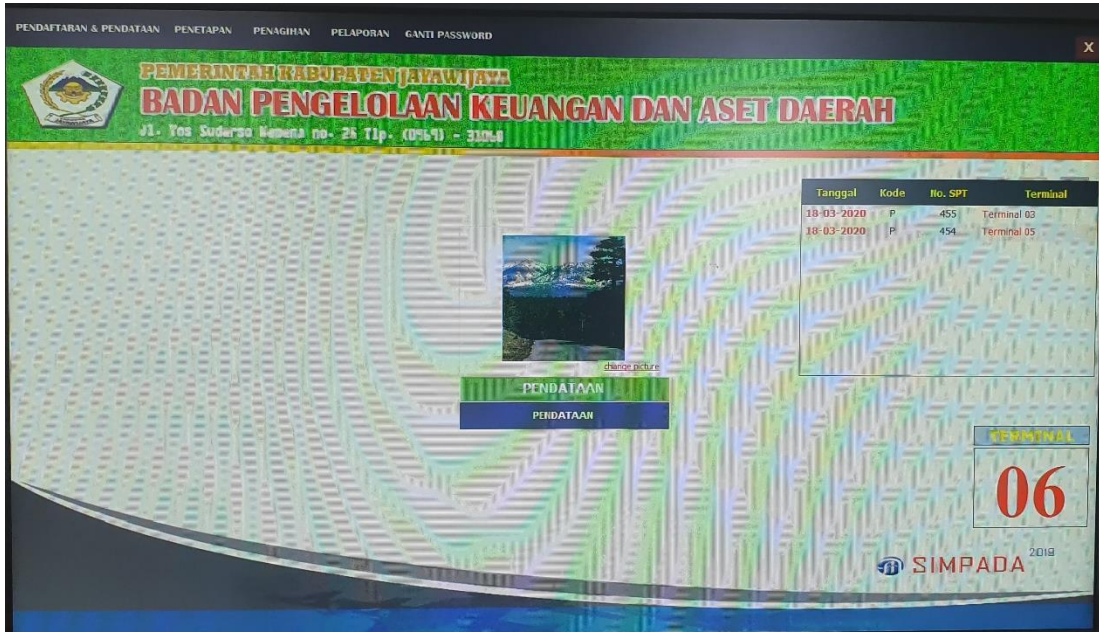
BIDANG ANGGARAN



RKA



BIDANG PENDAPATAN



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

DAFTAR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
Dan Tanggal : 01 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020

Tanggal Proses : 17 April 2020
Hal : 1 s.d 2

No	Surat Ketetapan		Nama	Alamat Usaha / Pemilik	NPWP	Rekening	Jumlah	Pend	Total	Keterlaksanaan
	Tanggal	Urut								
1.	04-02-2020	103	HOTEL CARTENZ / ANTONIUS W SARINA	JL. YOS SUDARSO / JL. YOS SUDARSO	P.1.0000940.05.005	411.01.09.00.00	999.000.00	0.00	999.000.00	Januari 2020
2.	04-02-2020	109	RUMAH SEWA / SUKARDI	JL. TRIKORA / JL. TRIKORA	P.1.0000113.05.005	411.01.15.00.00	1.260.000.00	0.00	1.260.000.00	Januari 2020
3.	10-02-2020	114	HOTEL RANJU JAYA II / M. ZAKARIA JAFAR	JL. GATOT SUBROTO / JL. GATOT SUBROTO	P.1.0000042.05.005	411.01.09.00.00	1.510.000.00	0.00	1.510.000.00	Desember 2019
4.	10-02-2020	110	RUMAH SEWA / ABDUL WAHAB	JL. TRIKORA / JL. TRIKORA	P.1.0000115.05.005	411.01.15.00.00	1.666.666.70	0.00	1.666.666.70	Desember 2019
5.	10-02-2020	111	RUMAH SEWA / ABDUL WAHAB	JL. TRIKORA / JL. TRIKORA	P.1.0000115.05.005	411.01.15.00.00	1.666.666.70	0.00	1.666.666.70	Januari 2020
6.	10-02-2020	112	RUMAH SEWA / ABDUL WAHAB	JL. TRIKORA / JL. TRIKORA	P.1.0000115.05.005	411.01.15.00.00	1.666.666.70	0.00	1.666.666.70	Februari 2020
7.	10-02-2020	795	HOTEL SHYAKIAL MAKMUR / BURHANUDDIN MARZUKI	JL. GATOT SUBROTO / JL. GATOT SUBROTO	P.1.0000036.05.005	411.01.09.00.00	1.260.000.00	0.00	1.260.000.00	Januari 2020
8.	12-02-2020	152	RUMAH SEWA / YOHANES LOGO	JL. IRIAN / JL. IRIAN	P.1.0000242.05.005	411.01.15.00.00	1.770.000.00	0.00	1.770.000.00	Januari 2020
9.	12-02-2020	153	RUMAH SEWA / YOHANES LOGO	JL. IRIAN / JL. IRIAN	P.1.0000242.05.005	411.01.15.00.00	1.770.000.00	0.00	1.770.000.00	Februari 2020
10.	13-02-2020	163	HOTEL GRAND SARTIKA / WANINGTYA SHINTA	JL. BHAYANGKARA / JL. BHAYANGKARA	P.1.0000041.05.005	411.01.09.00.00	5.085.000.00	0.00	5.085.000.00	Januari 2020
11.	13-02-2020	167	RUMAH SEWA / SUKARDI	JL. TRIKORA / JL. TRIKORA	P.1.0000113.05.005	411.01.15.00.00	1.260.000.00	0.00	1.260.000.00	Februari 2020
12.	14-02-2020	171	RUMAH SEWA / ARIFIN	JL. YOS SUDARSO / JL. YOS SUDARSO	P.1.0000118.05.005	411.01.15.00.00	12.360.000.00	0.00	12.360.000.00	Januari 2020
13.	17-02-2020	174	HOTEL SEKANIOT / SUMARMI SRIKANDI	JL. IRIAN / JL. IRIAN	P.1.0000031.05.005	411.01.09.00.00	750.000.00	0.00	750.000.00	Januari 2020
14.	17-02-2020	176	RUMAH SEWA / HAMIN	JL. IRIAN / JL. IRIAN	P.1.0000125.05.005	411.01.15.00.00	1.600.000.00	0.00	1.600.000.00	Januari 2020
15.	17-02-2020	180	RUMAH SEWA / HAYATUL HIDAYAT	JL. IRIAN / JL. IRIAN	P.1.0000125.05.005	411.01.15.00.00	1.600.000.00	0.00	1.600.000.00	Januari 2020

PENDAFTARAN & PENDATAAN PENETAPAN PENGIRIHAN PELAPORAN GANTI PASSWORD

01 Penetapan WP / WR

02 Penetapan Per Kohir

03 Penetapan SKPD-KB & SKPDT

04 Proses Angsuran

05 Utility Penetapan

06 Laporan Penetapan

07 Penetapan WP / WR Secara Jabatan

01 Cetak Surat Angsuran

02 Cetak Uang SKPD

03 Cetak Uang SKRD

04 Daftar Nomor Kohir Harian

05 Cetak Uang SKPD-KB / SKRD - KB

06 Cetak Daftar Ketetapan Per Tanggal

07 Cetak Daftar Ketetapan Per Jenis

08 Cetak Daftar Ketetapan

09 Cetak Rekap Ketetapan Bulanan

10 Cetak Rekap Ketetapan Tahunan dan Bulanan

11 Cetak Realisasi Ketetapan Harian

Tanggal	Kode	No. SPT	Terminal
18-03-2020	P	455	Terminal 03
18-03-2020	P	454	Terminal 05

PENDAFTARAN

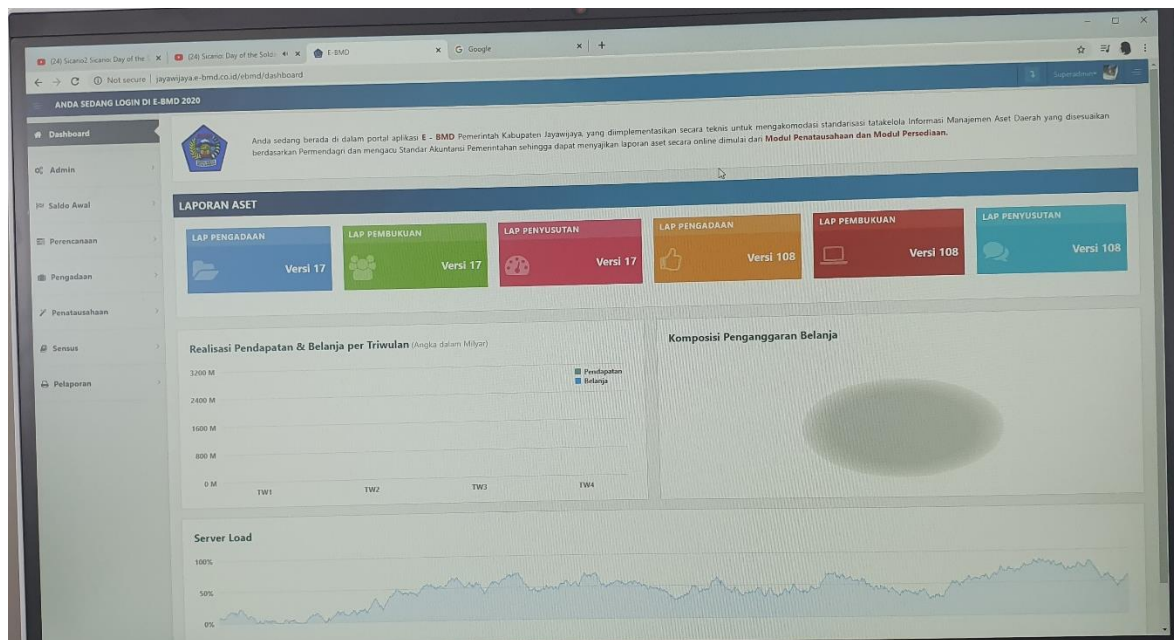
PENDATAAN

TERMINAL

06

SIMPADA 2019

BIDANG ASET



APLIKASI TPP

UNTUK MENGGUNAKAN APLIKASI INI DISARANKAN UNTUK MENGGUNAKAN BROWSER MOZILLA FIREFOX dapat di unduh disini



Masuk Sistem e-Kinerja ASN

Silahkan gunakan Nomor Induk Pegawai.

Ingat saya

Masuk

Renaksi © 2019

INFORMASI

Pengisian aktifitas
Super Administrator 2019-09-19 03:56:46
Bagi pegawai RSUD yang terjadwal SHIFT MALAM dapat mengisi Aktifitas Kerja di hari berikutnya mulai waktu 00.00.00 s/d waktu kepulangan

Perbaiki Sistem
Super Administrator 2019-09-10 03:02:44
Saat ini aplikasi sedang dalam perbaikan sistem, Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Sistem Database Absen Elektronik sedang dalam proses recovery

Informasi
Super Administrator 2019-08-25 17:29:13
Bagi admin OPD Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Satpol PP agar mengupload ulang Log kehadiran setelah tanggal 18 Agustus 2019. Terima kasih

e-Aktifitas

KABUPATEN JAYAWIJAYA Sistem Informasi Elektronik Aktifitas (e-Kinerja)

Informasi
PENGISIAN AKTIFITAS KERJA PEGAWAI DIHIMBAU AGAR DIISI SEBELUM TANGGAL 5 BULAN BERIKUTNYA

Informasi! ID Penilaian 60422
Harap Isi Alasan Penilai bulan April 2020 terlebih dahulu
[Isi disini!](#)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Profil Ringkasan Tugas Jabatan Uraian Tugas Aktifitas Utama Data Kepegawaian

DATA PEGAWAI
NIP: 197909212009041003
Nama Pegawai : ABDURRAHMAN A. BULUATIE, S.Kom
Gol/Ruang : III/a
Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

INFORMASI
[Lihat Data](#)

DATA BAWAHAN

Bulan Penilaian

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
✓	✓	✓	✓								

2018 © Tim IT Renaksi - Jayawijaya

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

e-TPP Beranda Referensi Absensi Laporan Pegawai Kontrak UPLOAD ABSEN MANUAL OPD Oman

Menu

- Rekap Kehadiran
- Rekap Aktifitas
- Rekap TPPB
- Pegawai
- Bawahan
- Dinas Luar / Sakit
- Setting Organisasi
- Absensi (Manual)
- Bulan Penilaian
- Registrasi Bulan Penilaian

Dashboard Admin Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Anda login sebagai Admin
Anda logout sebagai Super Admin LOGIN SUPER ADMIN

Bagi admin OPD Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Satpol PP agar mengupload ulang Log kehadiran setelah tanggal 18 Agustus 2019. Terima kasih 2019-08-25 17:29:13

Super Administrator
Perbaikan Sistem
Saat ini aplikasi sedang dalam perbaikan sistem, Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Sistem Database Absen Elektronik sedang dalam proses recovery 2019-09-10 03:02:44

Super Administrator
Pengisian aktifitas
Bagi pegawai RSUD yang terjadwal SHIFT MALAM dapat mengisi Aktifitas Kerja di hari berikutnya mulai waktu 00:00:00 s/d waktu kepulangan 2019-09-19 03:56:46

Daftar Aktifitas Kerja (Laporan Kerja Harian Pegawai) Abdurrahman

Tanggal:

Informasi:
SAAT INI ANDA DIBERLAKUKAN SISTEM SHIFT KERJA : Shift Struktural/Umum Kabupaten

Informasi:
ANDA DAPAT MENGISI AKTIFITAS KERJA JIKA ANDA SUDAH MELAKUKAN ABSENSI KEHADIRAN

DAFTAR ENTRY AKTIFITAS KERJA Tanggal : 01-04-2020

Nama Pegawai : Abdurrahman

TERIMA KASIH TELAH HADIR TEPAT WAKTU

Waktu kehadiran anda pukul 2020-04-01 08:00:00
Waktu Pulang anda pukul 2020-04-01 16:00:00
ANDA DAPAT MENGISI AKTIFITAS KERJA MULAI PUKUL 07.30

#	Waktu	Durasi	Aktifitas	Status
1	08:00 - 16:00	8 jam 0 menit	Melaksanakan tugas sesuai tugas fungsi jabatan Melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Diterima
			8 jam 0 menit	<input type="button" value="Cetak Laporan Aktifitas Harian"/>

SILAHKAN PILIH AKTIFITAS YANG DI LAPORKAN PADA TANGGAL 01 APRIL 2020

Istirahat siang
Satuan Output : istirahat.

Waktu Efektif = 60 Menit

APLIKASI SIAK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Pencarian

Pengaturan

Pendaftaran Penduduk

WNI

Orang Asing

Penduduk Rentan

Pencatatan Sipil

Arsip/Dokumen

Relasi/Terkait

Pendaftaran Online

Sinkronisasi

Aggregat Penduduk(GIS)

Statistik

Laporan

KABUPATEN JAYAWIJAYA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Kartu Keluarga Mutasi Penduduk Penduduk Non Permanen Pengajuan Cetak Cetak Pengajuan

INPUT BIODATA WNI PER KELUARGA F-1.01

DATA WILAYAH

Provinsi* PAPUA (91) Kabupaten/Kota* JAYAWIJAYA (2)

Kecamatan* ==PILIH KECAMATAN== Desa/Kelurahan* ==PILIH KELURAHAN/DESA==

DATA KELUARGA

No. Kartu Keluarga **Created By System** Nama Kepala Keluarga*

Alamat Keluarga* RT

RW Nama Dusun/Kampung /Dukuh

Kode Pos Telepon

DATA INDIVIDU

NIK **Created By System** Nama Lengkap*

No. KTP/Nopen Tempat Tinggal Sebelumnya

No. Paspor Tanggal Berakhir Paspor

Jenis Kelamin* == PILIHAN == Tempat Lahir*

Tanggal Lahir* 00:00 Akta Lahir/Surat Kenal Lahir* == PILIHAN == No. Akta

Golongan Darah* == PILIHAN == Agama/Kepercayaan* == PILIHAN ==

Status Perkawinan* == PILIHAN == Pencatatan Perkawinan == PILIHAN == No. Akta

Tanggal Perkawinan Pecatatan Perceraian == PILIHAN == No. Akta

Tanggal Perceraian SHBKEL* KEPALA KELUARGA

Kelainan Fisik dan Mental* == PILIHAN == Penyandang Cacat == PILIHAN ==

Pendidikan Terakhir* == PILIHAN == Jenis Pekerjaan* == PILIHAN == == PILIHAN ==

SMS Phone* Email*

DATA ORANG TUA

NIK Ibu Nama Lengkap Ibu*

NIK Ayah Nama Lengkap Ayah

DATA ADMINISTRASI

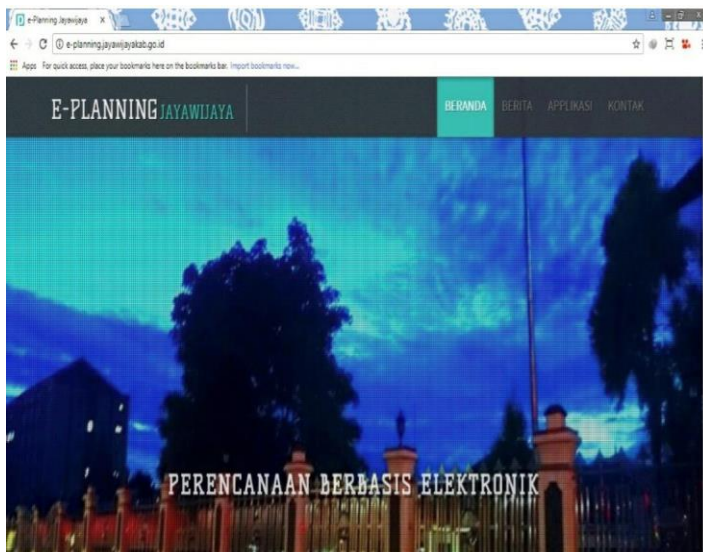
Nama Ketua RT Nama Ketua RW

Nama Petugas Registrasi* NIP Petugas Registrasi

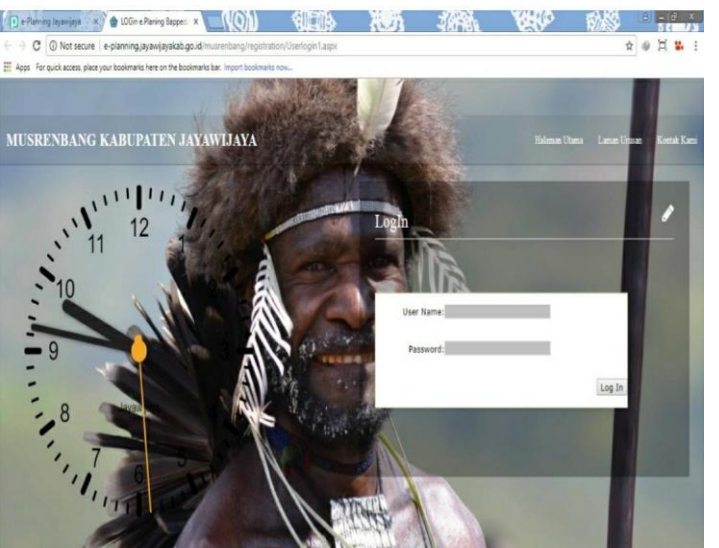
Simpan Gelar Foto Anggota KK KK Baru

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

APLIKASI E-PLANNING



Rekening	Sumber Dana	Program / Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target Capaian	PJP	Catatan	Update	Di Update
1.1.01.01.01	DAU	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Dinas Pendidikan	Jember Dinas Pendidikan
1.1.01.01.01	DAU	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	jumlah surat		12 Bulan	100.000		Dinas Pendidikan	Monday, 05 March 2018 16:28:13
1.1.01.01.01	DAU	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Dinas Pendidikan	Jember Dinas Pendidikan
1.1.01.01.01	DAU	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	jumlah surat		12 Bulan	0.00		Dinas Pendidikan	Monday, 05 March 2018 14:42:44
1.1.01.01.01	DAU	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Dinas Pendidikan	Jember Dinas Pendidikan
1.1.01.01.01	DAU	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	jumlah surat		12 Bulan	0.00		Dinas Pendidikan	Monday, 05 March 2018 14:42:26
1.1.01.01.01	DAU	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Dinas Pendidikan	Jember Dinas Pendidikan
1.1.01.01.01	DAU	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	jumlah surat		12 Bulan	0.00		Dinas Pendidikan	Monday, 05 March 2018 13:55:10



Kode Rekening	Unsur/Bidang Unsur Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2019		Catatan Penting	Prestasi Wkt Tahun 2019		
				Target Capaian	Pagu Indikat		Volume	Pagu Indikat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
URUSAN PEMERINTAHAN WILAYAT BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.01.01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000 100.000									
1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	jumlah surat		12	00	0	DAU	12	0
1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	jumlah surat		12	00	100.000	DAU	12	100.000
1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	jumlah surat		12	00	0	DAU	12	0
1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	jumlah surat		12	00	0	DAU	12	0
1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	jumlah surat		12	00	0	DAU	12	0
1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	jumlah surat		12	00	0	DAU	12	0
1.01.01.02	Program Pengkajian Sarana dan Prasarana Aparatur					1.900.000			2.000.400
1.01.01.02.01	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	keersediaan	JAYAWIJAYA (Kabupaten)	12	Bulan	1.900.000	0000	12	2.000.400
1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					1.100.000			1.200.000
1.01.01.16.01	Pembangunan gedung sekolah	jumlah/kegiatan/realisasi/anggaran/realisasi/anggaran		12	MD	1.100.000	DAU	12	1.200.000